



LMCK

(LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA)



TRIWULAN II | 2025

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT DAYA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI



**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Papua Barat Tahun 2025**

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat**

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Masnah, S.Pd.I	PIC Kegiatan SAKIP	10-7-2025	
2.	Diperiksa	Raditya Firmansyah Darmawan, S.S.T (TD)., M.T	Kepala Subbagian Tata Usaha	10-7-2025	
3.	Disetujui	Raditya Firmansyah Darmawan, S.S.T (TD)., M.T	Kepala Subbagian Tata Usaha	10-7-2025	
4.	Disetujui	Andreas, S.E, M.E.	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan	10-7-2025	
5.	Disetujui	Herwanto, A.Md.LLAJ., S.IP., M.M.	Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	10-7-2025	
6.	Disetujui	M. Wahyu Arya Putra, SE., MMTR	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	10-7-2025	



• **KATA**

PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Inayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan Monitoring Capaian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat merupakan sarana pemantauan capaian kinerja dan anggaran berdasarkan dokumen perjanjian kinerja. Berdasarkan Timeline SAKIP Tahun 2025 Laporan Monitoring Capaian Kinerja terdiri dari 4 laporan yaitu Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV. Dimana setiap laporan akan menjelaskan capaian kinerja dan anggaran setiap periode triwulan berdasarkan Perjanjian Kinerja.

Kami berharap Laporan Monitoring Capaian Kinerja ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Sorong, 18 Juli 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Papua Barat



Edy Purwanto
NIP. 19841217 200912 1 002



• RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF

Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengusung Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Visi itu akan diwujudkan dengan 8 misi yang disebut Asta Cita. Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, mulai tahun 2025 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6% hingga 7%. Pertumbuhan ini perlu didukung dengan penguatan peran pemerintah dalam roda ekonomi dan pembangunan bangsa sesuai falsafah Ekonomi Pancasila. Pencapaian visi Kabinet Kerja tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dalam rangka mendukung visi Presiden RI pada Tahun 2025 ditetapkan 5 (lima) Sasaran Indikator dan 9 (sembilan) indikator Kinerja Program dengan targetnya.

Dari 23 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat pada Triwulan II Tahun 2025 terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang lebih besar atau sama dengan 100% ($0\% \leq \text{IKK} < 100\%$) dan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang kurang dari 100% ($0\% \leq \text{IK} < 100\%$). Adapun rincian untuk setiap IKK pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan terealisasi sebanyak 23 Trayek (target 23 Trayek) tercapai 100%;
2. Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas terealisasi sebanyak 0 unit (target 1 Unit) tercapai 0%;
3. Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP terealisasi sebanyak 5 Trayek (target 5 Trayek) tercapai 100%;
4. Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM terealisasi sebanyak 0 unit (target 2 Unit) tercapai 0%;
5. Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM terealisasi sebanyak 7 Lokasi (target 7 Lokasi) tercapai 100%;
6. Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang terealisasi sebanyak 3 kegiatan (target 3 kegiatan) tercapai 50%;
7. Pengawasan Evaluasi MRL dan Andalalin terealisasi sebanyak 2 kegiatan (target 6 kegiatan) tercapai 40%;
8. Pengawasan Evaluasi Perlengkapan Jalan terealisasi sebanyak 1 kegiatan (target 2 kegiatan) tercapai 50%;
9. Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan terealisasi sebanyak 0 kegiatan (target 1 kegiatan) tercapai 0%;
10. Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah terealisasi sebanyak 0 kegiatan (target 6 kegiatan) tercapai 0%;

11. Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis terealisasi sebanyak 3.385 Unit (target 3.593 unit) tercapai 94,2%;
12. Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda terealisasi sebanyak 0 Orang (target 400 Orang) tercapai 0%;
13. Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda terealisasi sebanyak 0 Orang (target 100 Orang) tercapai 0%;
14. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebanyak 2 kegiatan (target 3 kegiatan) tercapai 67%;
15. Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebanyak 1 dokumen (target 1 dokumen) tercapai 100%;
16. Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan terealisasi sebanyak 1 kegiatan (target 2 kegiatan) tercapai 50%;
17. Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebanyak 1 kegiatan (target 1 kegiatan) tercapai 100%;
18. Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan terealisasi sebanyak 1 dokumen (target 1 dokumen) tercapai 100%;
19. Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebanyak 2 dokumen (target 6 dokumen) tercapai 33,3%;
20. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebanyak 3 kegiatan (target 3 kegiatan) tercapai 100%;
21. Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) terealisasi sebanyak 1 kegiatan (target 1 kegiatan) tercapai 100%;
22. Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa terealisasi sebanyak 3 kegiatan (target 3 kegiatan) tercapai 100%;
23. Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja terealisasi sebanyak 0 kegiatan (target 3 kegiatan) tercapai 0%;

Nilai Kinerja Organisasi dengan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran program dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan cukup baik dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), pelaksanaan program reformasi birokrasi, serta adaptasi terhadap teori/praktik terbaik dan terkini.



B A B I

P E N D A H U L U A N

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang

Untuk menunjang penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan akuntabilitas publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraannya. Hal ini merupakan salah satu kriteria untuk instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi kepada masyarakat dan rakyat. Selain itu, akuntabilitas publik juga diperlukan sebagai tolak ukur fluktuasi dan perbandingan kinerja suatu instansi disetiap tahunnya.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN. Laporan Monitoring Capaian Kinerja disusun berdasarkan realisasi kegiatan dan anggaran dari indikator kinerja kegiatan pada perjanjian kinerja Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja merupakan hasil integrasi dan sinergi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain di dalam suatu Instansi Pemerintah, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan di lingkungan masyarakat yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun global.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja berdasarkan siklus anggaran yang berjalan per tiga bulan. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Dalam penyusunan suatu kegiatan belanja, dibuat suatu masukan yaitu besaran dana yang dibutuhkan, hasil yaitu sesuatu hasil atau bentuk nyata yang didapat dari dana yang dikeluarkan. Manfaat yaitu manfaat yang didapat karena kegiatan belanja tersebut dilaksanakan serta dampak yaitu dampak yang dihasilkan karena pelaksanaan suatu kegiatan belanja.

Dalam pembuatan Laporan Monitoring Capaian Kinerja suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat yang didapat dari penyusunan suatu Laporan Monitoring Capaian Kinerja yaitu evaluasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah terhadap instansinya sendiri sehingga pimpinan instansi tersebut dapat mengevaluasi kinerja dari instansi yang dipimpinnya selama 3 (tiga) bulan anggaran juga menjadi dasar untuk membuat LKIP pada akhir Tahun.

I. 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat, yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Tugas Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat adalah melaksanakan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- 2) Fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat adalah :
 - a) penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b) pelaksanaan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan;
 - c) pelaksanaan pengendalian keselamatan sarana dan angkutan jalan, keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, serta melaksanakan kegiatan keperintisan;
 - d) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalulintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
 - e) pelaksanaan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;

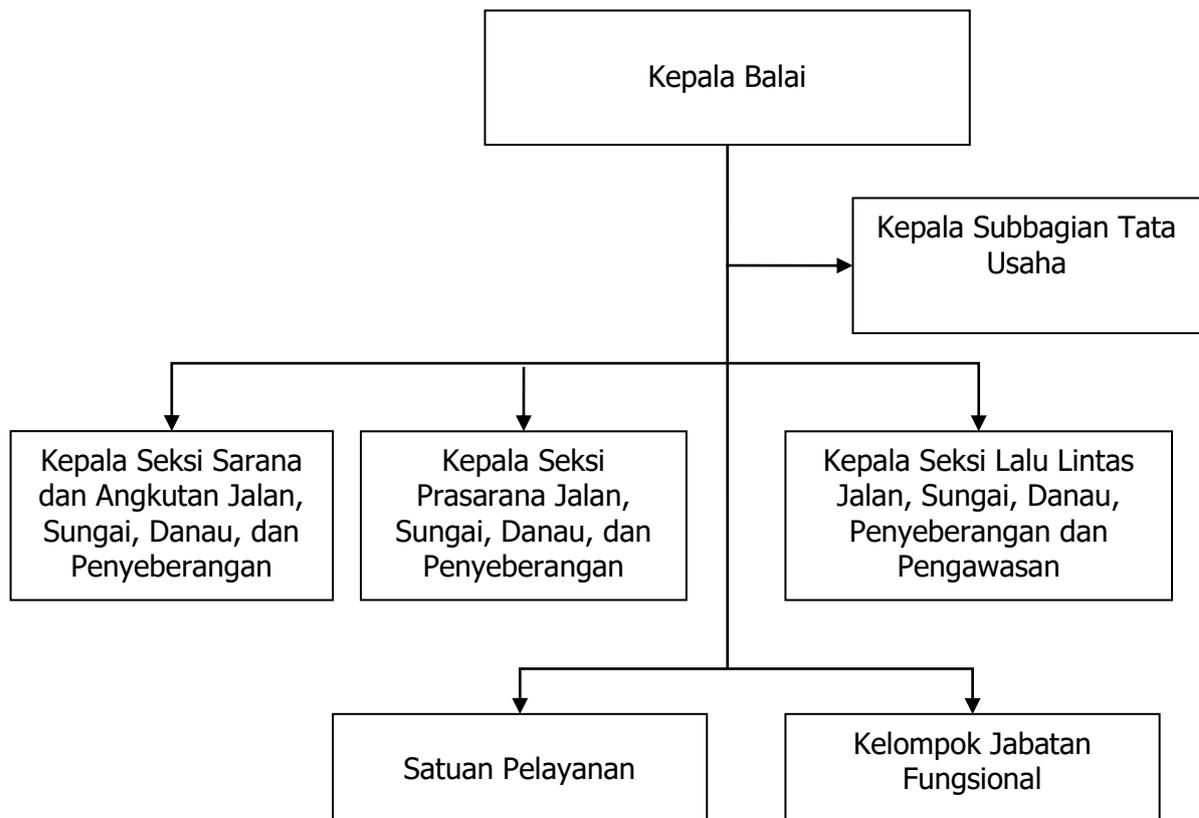
I.2.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor PM 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat dipimpin oleh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat merupakan BPTD kelas II.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
3. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan;
4. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI
DARAT KELAS II PAPUA BARAT**



Gambar I. 1 Bagan Struktur Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, pengelolaan urusan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi, urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipandan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

2. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian terminal tipe A, terminal barang untuk umum, dan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis fasilitas pendukung dan integrasi moda dan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.

3. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala dan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor, pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal, analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang disubsidi oleh pemerintah pusat, penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalan dan pelayaran perintis sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis penyediaan sarana jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.
4. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional, penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau, sarana bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau, dan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai dan danau, pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol, pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte, dan rambu sungai danau, pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan, kegiatan karoseri, penyelenggara pengujian berkala kendaraan bermotor, pelabuhan dan penyelenggara pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersil, operator kapal sungai, danau, dan penyeberangan, kendaraan bermotor di jalan, tarif angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, pemberian subsidi angkutan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemenuhan perlengkapan jalan, persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas, pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan, pemenuhan kelaiklautan kapal sungai, danau, dan penyeberangan, ketepatan waktu pelayanan, dan pemberian subsidi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sarana bantu navigasi pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, rambu, alur, dan halte sungai danau, kegiatan pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai danau, dan pemanfaatan bantuan teknis, pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pada pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta patroli dan pengamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

I. 3 Sumber Daya Manusia

Data sumber daya manusia pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat pada Tahun 2025 terdapat 144 orang dengan rincian 68 Orang PNS, 38 Orang PPPK dan 38 Orang tenaga outsorsing dengan rincian penempatan sebagai berikut:

Tabel I. 1 Daftar pegawai Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat

No	Nama Bagian	Jumlah Pegawai
1	Kepala Balai	1 orang
2	Subbagian Tata Usaha	30 Orang
3	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	16 orang
4	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	22 orang
5	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan	16 orang
6	Satuan pelayanan (SATPEL)	
	1) Satpel Pelabuhan Penyeberangan Klademak	16 orang
	2) Satpel Pelabuhan Penyeberangan Arar	12 orang
	3) Satpel Pelabuhan Penyeberangan Marampa	10 orang
	4) Satpel Pelabuhan Penyeberangan Folley	5 orang
	5) Satpel Pelabuhan Penyeberangan Waigeo	5 orang
	6) Satpel Pelabuhan Penyeberangan Salawati	5 orang
	7) Satpel Pelabuhan Penyeberangan Batanta	6 orang
	Total	144 orang

I. 4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

Kewenangan

- a. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 1) Terkait prasarana jalan merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
 - 2) Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 3) Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009

Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

- b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 1) Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
 - 2) Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.
- c. PM No. PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;
- 2) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan;
- 4) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 5) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perhubungan di daerah;
- 6) Pelaksanaan analisis dan rekomendasi kebijakan transportasi;
- 7) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi; dan
- 8) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian perhubungan.

I.4.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai dalam rangka pelaksanaan tupoksi. Kebutuhan Sumber Daya Manusia dalam hal ini pegawai di lingkungan kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat masih sangat banyak, mengingat wilayah kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat merupakan Balai dengan 2 (dua) Provinsi yaitu Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat dan juga banyak terdapat Satuan Pelayanan.

I.4.1. Anggaran

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat karena terdapat beberapa kegiatan yang mengalami pemotongan anggaran.

I.4.2. Isu Strategis

Infrastruktur penunjang konektivitas nasional baik berupa jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi, perlu diintegrasikan dengan pelayanan sarana intermoda transportasi yang terhubung secara efisien dan efektif, termasuk mendorong pembangunan konektivitas antarwilayah, sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Penyediaan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, dan mempercepat gerak ekonomi.

Kebijakan strategis untuk mewujudkan konektivitas nasional adalah :

1. Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda;
2. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global;
3. Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;
4. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi;
5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan;
6. Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi;
7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pengembangan sumber daya manusia.

I.4.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan I Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat adalah:

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja

3. Indikator Kinerja Kegiatan
4. Pengukuran Kinerja
5. Evaluasi Kinerja

I. 5 SISTEMATIKA LAPORAN

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Tugas Pokok dan Fungsi
 - I.2.1 Bagan Struktur Organisasi
- I.3 Sumber Daya Manusia
- I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I.5 Sistematika Laporan
- I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis
 - I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025
- I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

- II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja
- II.2 Pengukuran Capaian Kinerja
 - II.3.1 SK2 Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK
 - 1. IKK2.1 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
 - II.3.2 SK5 Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan
 - 1. IKK5 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

2. IKK6 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

II.3.3 SK 8 Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP

1. IKK 8.1 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
2. IKK 8.2 Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

II.3.4 SK 9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang

1. IKK 9.2 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
- 2. IKK 9.5 Pengawasan Evaluasi MRLI dan Andalalin
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
- 3. IKK9.6 Pengawasan Evaluasi Perlengkapan Jalan
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
- 4. IKK9.7 Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

II.3.5 SK 10 Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety

- 1. IKK 10.2 Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

II.3.6 SK 11 Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan

1. IKK 11.1 Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

II.3.7 SK 12 Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan

1. IKK 12.1 Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
2. IKK 12.2 Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

II.3.8 SK4 Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal

1. IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

2. IKK 4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
3. IKK 4.3 Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
4. IKK 4.4 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
5. IKK 4.5 Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
6. IKK 4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
7. IKK 4.7 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat
- a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
8. IKK 4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)
- a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
9. IKK 4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
- a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
10. IKK 4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja
- a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

II.3 Realisasi Anggaran

II.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2025

1. Pagu Anggaran
 - a. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2025
 - b. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2025
 - c. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran
2. Refocusing Anggaran Tahun 2025
 - a. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025
 - b. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2025
 - c. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2025
 - d. Rincian Realokasi Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2025
3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2024-2025

II.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025

1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2025
2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025
3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025
4. Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

II.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan
2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (Tabel Perbandingan Jumlah Kebutuhan dan Jumlah Eksisting SDM)
3. Hambatan dan Kendala

BAB III PENUTUP

III.1 Penutup

III.1.1 Ringkasan Capaian

III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Lampiran

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025;

3. Rencana Aksi Tahun 2025;
4. Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
5. Revisi I Rencana Aksi Tahun 2025;
6. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2025.

I. 6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2025-2029 saat ini masih dalam proses perumusan sehingga pada laporan ini masih menggunakan Rencana Strategis periode 2020-2024 dan akan dilakukan perbaikan jika sudah ada RENSTRA terbaru.

Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2020-2024 disusun dengan mempertimbangkan berbagai mandat dari peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan, dan juga penugasan kepada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat sesuai amanat UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Target capaian kinerja maupun rencana inventarisasi yang dimuat di dalam dokumen Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2020-2024 ini bersifat indikatif, sehingga potensi terjadinya deviasi dalam implementasinya masih cukup terbuka. Namun demikian perlu dicatat bahwa pencapaian target pembangunan maupun peningkatan kinerja akan sangat bermanfaat bagi pembangunan nasional di segala bidang, karena ketersediaan jaringan dan kualitas layanan jalan yang handal dan prima akan menjadi tulang punggung pembangunan negara kepulauan Indonesia dalam 5 tahun kedepan.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2020 - 2024, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel I. 2 Target Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Periode Renstra 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline 2019	Target S.D 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan	%	100	100
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-	-

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline 2019	Target S.D 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	-	-
		IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-	-
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	-	100
		IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	5	8
		2.	SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	-	-
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	100
3.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	100
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	-	-
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan di jalan nasional	Lokasi	-	2
		IKK3.4	Jumlah ketersediaan	Lokasi	-	-

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline 2019	Target S.D 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		taman edukasi			
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	-	500
		IKK7.a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	100
		IKK4.7 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	-	-
4.	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80	90
5.	SK6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK6.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	90

I.6.1 Uraian Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan turunan dari Rencana Strategis. Rencana Kinerja Tahunan menggambarkan rencana kegiatan yang akan dilakukan dengan target per tahun berjalan. Pada Tahun 2025 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat memiliki Rencana Kinerja Tahunan sebagai berikut:

Tabel I. 3 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1.	SK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7
2.	SK2 Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
3.	SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	500
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
4.	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5.	SK1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

I. 7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai turunan dari program kerja Menteri Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2025 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Pada Tahun anggaran 2025 Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat berdasarkan Renstra terdapat 5 Sasaran Kegiatan dan 9 Indikator Kinerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 92.243.346.000,-. Adapun uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel I. 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	SK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7
4.	SK2 Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
3.	SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	500

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
4.	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5.	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

KEGIATAN		ANGGARAN	
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	60.113.993.000
2.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	17.352.602.000
3.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	3.914.645.000
4.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	10.862.106.000

I.8 Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II terdapat Revisi Perjanjian Kinerja karena adanya pergantian pimpinan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan adanya perubahan pada indikator Kinerja menyesuaikan dengan konsep Renstra periode 2025-2029.

Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat terdapat 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 92.243.346.000,-. Adapun uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel I. 5 Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
5.	SK2 Meningkatkan konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK2.1 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan	Trayek	25
6.	SK5 Meningkatkan rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK5 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	1
		IKK6 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Trayek	5
3.	SK8 Meningkatkan Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK8.1 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	2
		IKK8.2 Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Lokasi	7
4.	SK9 Meningkatkan Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK9.2 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang	Kegiatan	6
		IKK9.5 Pengawasan Evaluasi MRL dan Andalalin	Kegiatan	5

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
		IKK9.6 Pengawasan Evaluasi Perengkapan Jalan	Kegiatan	4
		IKK9.7 Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Kegiatan	1
5.	SK1 Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK10.2 Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah	Kegiatan	6
6.	SK1 Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK11.1 Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis	Unit	3.593
7.	SK1 Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	IKK12.1 Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	400
		IKK12.2 Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	100
8.	SK4 Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal	IKK4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3
		IKK4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1
		IKK4.3 Kegiatan terkait Maturitas Kemeterian Perhubungan SPIP	Kegiatan	2
		IKK4.4 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1
		IKK4.5 Tingkat Lanjut Rekomendasi	Dokumen	1

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
		Audit/Pemeriksaan		
		IKK4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	6
		IKK4.7 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3
		IKK4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	1
		IKK4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	3
		IKK4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	3

KEGIATAN	ANGGARAN
5. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 60.113.993.000
6. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 17.352.602.000
7. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 3.914.645.000
8. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 10.862.106.000



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

II.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e-Performance yang menyediakan fasilitas Inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal. Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target PK}} \right) \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Program Tahun 2025. Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

II.2. **PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA**

Dari hasil pengukuran kinerja, dengan menggunakan perbandingan antara target perjanjian kinerja dengan capaian Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat maka diperoleh data Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat pada Triwulan II adalah sebesar 54,76%. Nilai tersebut berasal dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kegiatan sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel II. 1 Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat

Pada Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II terdapat perubahan indikator Kinerja Kegiatan karena menyesuaikan dengan konsep Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat periode 2025-2029. Adapun pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat pada Triwulan II adalah sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET	Triwulan I			Triwulan II		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
SK2	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK								
IKK 2.1	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan	%	23	23	23	100%	23	23	100%
SK5	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan								
IKK5	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	1	1	0	0%	1	0	0%
IKK6	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Trayek	5	5	5	100%	5	5	100%
SK8	Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP								
IKK 8.1	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	2	2	0	0%	2	0	0%
IKK8.2	Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Lokasi	7	7	7	100%	7	7	100%
SK9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang								
IKK9.2	Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang	Kegiatan	6	6	2	33,3%	6	3	50%
IKK 9.5	Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin	Kegiatan	5	5	0	0%	5	4	40%
IKK 9.6	Pengawasan Evaluasi Perlengkapan Jalan	Kegiatan	4	4	0	0%	4	1	25%
IKK9.7	Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	1	1	0	0%	1	0	0%
SK10	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety								
IKK 10.2	Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah	Kegiatan	6	6	0	0%	6	0	0%
SK11	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan								
IKK11.1	Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan sesuai	Unit	3.593	3.593	3.385	94,2%	3.593	3.385	94,2%

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET	Triwulan I			Triwulan II		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
	spesifikasi teknis								
SK12	Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan								
IKK12.1	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	400	400	0	0%	400	0	0%
IKK12.2	Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	100	100	0	0%	100	0	0%
SK4	Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal								
IKK4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	3	1	33.3%	3	2	67%
IKK4.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1	1	0	0%	1	1	100%
IKK4.3	Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan	Kegiatan	2	2	0	0%	2	1	50%
IKK4.4	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1	1	1	100%	1	1	100%
IKK4.5	Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1	1	1	100%	1	1	100%
IKK4.6	Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	6	6	2	33,3	6	2	33,3%
IKK4.7	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	3	3	100%	3	3	100%
IKK4.8	Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	1	1	1	100%	1	1	100%
IKK4.9	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	3	3	1	33,3%	3	1	33,3%
IKK4.10	Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	3	3	0	0%	3	0	0%
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						40,32%			51,86%
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKK≥100%)						7			8
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0%≤IKK<100%)						16			15

Jika dilihat lebih detail pada Triwulan II Tahun 2025 berdasarkan perjanjian kinerja dari 9 IKK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat, terdapat 1 (satu) IKK yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$) dan 8 (delapan) IKK kurang dari 100% ($0\% \leq IKK < 100\%$). Penjelasan capaian IKK untuk setiap sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

II. 3. 1 **SK 2 Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK**

Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK
 Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. **IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan**

a.1. Definisi Indikator Kinerja

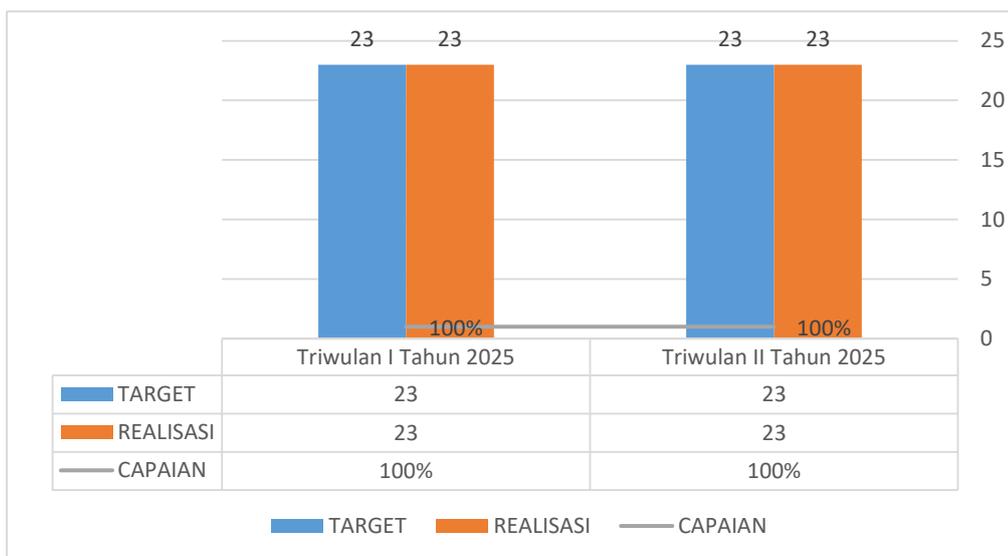
Jumlah Layanan subsidi Transportasi Angkutan Jalan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan Angkutan Perintis di Jalan dengan jumlah pelayanan yang direncanakan. Dalam hal ini Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat melaksanakan subsidi ke 3 cabang terminal Damri yang berada di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Adapun 3 cabang damri tersebut adalah:

Tabel II. 2 Perum Damri di Provinsi Papua dan Papua Barat

No	Nama Perum	Jumlah Trayek
1	Damri Cabang Sorong	7 Trayek
2	Damri Cabang Sorong Selatan	10 Trayek
3	Damri Cabang Manokwari	6 Trayek
Total Trayek		23 Trayek

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah Layanan subsidi Transportasi Angkutan Jalan Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 23 trayek jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2025 sebanyak 23 Trayek maka capaian kinerja mencapai 100% Pencapaian digambarkan pada grafik di bawah ini:



Gambar II. 1 Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Narasi Dasar Hukum

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 5958 Tahun 2024 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2025. Dalam Surat Keputusan tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) jaringan trayek dari 3 cabang Damri dibawah naungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat.

Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Layanan subsidi Transportasi Angkutan Jalan target 23 Trayek yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Jumlah Layanan subsidi Transportasi Angkutan Jalan antara lain:

1. Dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dan pemerintah daerah dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan pelayanankeperintisan angkutan jalan.
2. Masih diperlukannya angkutan keperintisan di daerah yang belum terjangkau oleh angkutan umum.
3. Angkutan keperintisan menjadi salah satu pilih transportasi yang murah.

Potensi Kegagalan

Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Layanan subsidi Transportasi Angkutan Jalan memiliki capaian kinerja 31,80%. Terdapat potensi kegagalan yang dapat disebabkan oleh beberapa kendala sebagai berikut :

1. Terdapat efisiensi anggaran sehingga kegiatan tidak dapat berjalan dengan maksimal;
2. Trayek tidak dapat beroperasi karena ruas jalan pada trayek tersebut rusak.
3. Usia kendaraan yang sudah tua dan adanya kelangkaan BBM.

Perhitungan Realisasi Kinerja

Capaian Jumlah Layanan subsidi Transportasi Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :

No	Cabang Damri	Trayek	Ritase	Ritase	
			Target	Realisasi s.d. Juni 2025	Sisa
1	2	3	4	5	
PROVINSI PAPUA BARAT					
1	SORONG	1) Sorong - Seget	286	43,5	242,5
		2) Sorong - Klasari	300,5	103	183
		3) Sorong - Arar	305	88,5	197,5
		4) Sorong - Batu Payung - Klawak	305	102,5	183,5
		5) Sorong - Saoka	303	93,5	192,5
		6) Inam - Kebar - Mia	302	75	211
		7) Sorong-Klafdalín	296,5	90	196
Jumlah			2098	596	1502
2	SORONG SELATAN	1) Teminabuan - Seremuk	302,5	100	186
		2) Teminabuan - Moswaren	304	105	181
		3) Teminabuan - Wayer	303	98	188
		4) Teminabuan - Sasnek	304	108	178
		5) Teminabuan - Aitinyo	305	108	178
		6) Teminabuan - Ayamaru	305	108	178
		7) Kajase - Konda	305	94	191,5

No	Cabang Damri	Trayek		Ritase	Ritase	
				Target	Realisasi s.d. Juni 2025	Sisa
1	2	3		4	5	
		8)	Kajase - Pasir Putih	305	108	178
		9)	Kajase - Haemaran - Joksiro	305	107	179
		10)	Kajase - Waihali	303,5	108	178
Jumlah				3042	1044,5	1997,5
3	MANOKWARI	1)	Manokwari - Arfu	305	95	191
		2)	Manokwari - Saray	151	52	91
		3)	Manokwari - Sidey	305	95	191
		4)	Manokwari - Masni	305	95	191
		5)	Manokwari - Momiwaren	305	95	191
		6)	Momiwaren - Ransiki	305	95	191
Jumlah				1676	527	1149
Total Provinsi Papua Barat & Papua Barat Daya				6816	2167,5	4648,5

Realisasi Kinerja = Jumlah Trayek realisasi pada tahun (n)

Realisasi Kinerja = 23 Trayek

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi kinerja, berdasarkan realisasi trayek sampai dengan triwulan II jika dibandingkan dengan target Trayek dalam 1 (satu) tahun dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Jumlah Layanan subsidi Transportasi Angkutan Jalan yakni 23 Trayek.

Perhitungan Capaian Kinerja

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{23}{23} \times 100 = 100 \%$$

Berdasarkan perhitungan capaian kinerja Jumlah Layanan subsidi Transportasi Angkutan Jalan dimana target yaitu 23 Trayek kemudian realisasi sebesar 23 trayek sesuai dengan rumus yang digunakan yaitu realisa dibagi target maka capaian yang di peroleh yaitu 100%.

Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Jumlah Layanan subsidi Transportasi Angkutan Jalan dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 6.436.860.143,- dan realisasi anggaran hingga akhir Triwulan II sebesar Rp. 2.109.208.997. atau sebesar 32,77% dari nilai kontrak.

- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:
1. Mengadakan pemeriksaan rutin armada minimal 3 (tiga) bulan sekali, agar apabila terjadi kerusakan pada armada dapat segera ditangani dan bisa melakukan pelayanan secara maksimal.
 2. Menghimbau kepada Perum Damri yang memiliki armada Bus yang mengalami kerusakan agar melakukan perbaikan dan pemeriksaan secara rutin.
 3. Melakukan persiapan addendum terkait target ritase.

II. 3. 2 SK 5 Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan

Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan. Sasaran kegiatan ini terdapat 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yang akan di jelaskan sebagai berikut.

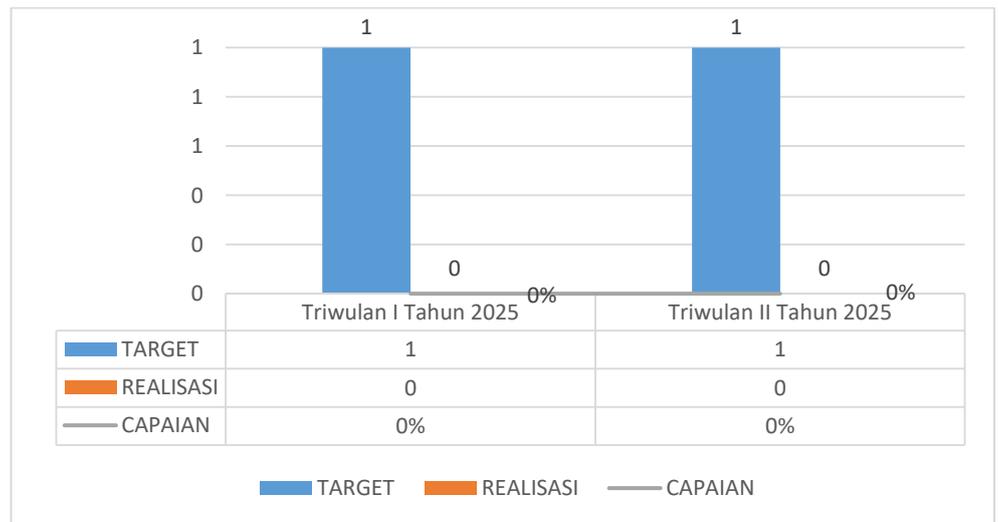
1. IKK 5 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas adalah jumlah pelabuhan penyeberangan yang saat ini dalam proses pembangunan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Daya. Pada Tahun 2025 terdapat 1 (satu) kegiatan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan yaitu pembangunan pelabuhan penyeberangan Kaimana Tahap IV di Kabupaten Kaimana.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Target kegiatan Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas adalah 1 (satu) Unit dan Realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 adalah 0 Unit. Kegiatan belum dilaksanakan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga sampai saat ini anggaran pembangunan pelabuhan Kaimana tahap IV masih terblokir. Realisasi Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas dapat digambarkan pada grafik dibawah ini:



a.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Dasar Hukum

Pada PM 91 Tahun 2021 disebutkan bahwa Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan yang berfungsi sebagai simpul untuk menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya. Berdasarkan hal tersebut untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui penyeberangan maka di perlukan fasilitas yang memadai salah satunya adalah adanya pelabuhan penyeberangan.

Kronologi Target

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas memiliki target 1 (satu) Unit yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor keberhasilan

Dalam pelaksanaannya terdapat Faktor keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas adalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan masyarakat sekitar terhadap ketersediaan fasilitas yang dapat membantu aktivitas sehari-hari;
2. Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara pihak Balai Pengelola Transportasi darat Kelas II Papua Barat Daya dengan penyedia atau kontraktor;
3. Ke

Faktor kegagalan

Dalam pelaksanaannya juga terdapat faktor kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan anggaran yang belum pasti mengingat saat ini terdapat kebijakan efisiensi anggaran;
2. Saat ini anggaran masih di blokir sehingga kegiatan belum bias dilaksanakan;
3. Terdapat sisa kegiatan tahap sebelumnya yang masih belum dilaksanakan.

Realisasi kinerja

Perhitungan realisasi kinerja yakni sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \left(\frac{\text{realisasi jumlah pelabuhan yang sedang dibangun}}{\text{Target jumlah pelabuhan yang sedang dibangun}} \right) \times 100 \%$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{0}{1} = 0$$

Capaian kinerja

Perhitungan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100 \%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$$

Pagu, realisasi dan capaian keuangan

Pagu anggaran kegiatan Pembangunan Pelabuhan Kaimana Tahap IV di Kab. Kaimana adalah sebesar Rp. 17.000.000.000 dan realisasi anggaran hingga saat ini adalah 0 karena sampai saat ini anggaran kegiatan masih di blokir sehingga tidak dapat digunakan sehingga capaian keuangan juga masih 0%.

- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
1. Melakukan koordinasi kebagian anggaran Seditjen terkait kemungkinan pembukaan blokir anggaran;
 2. Melakukan koordinasi dengan pihak kontraktor terkait pelaksanaan kegiatan;
 3. Melakukan persiapan dokumen dan data dukung jika kegiatan tidak dapat dilaksanakan Tahun ini maka akan di alihkan ke Tahun berikutnya.

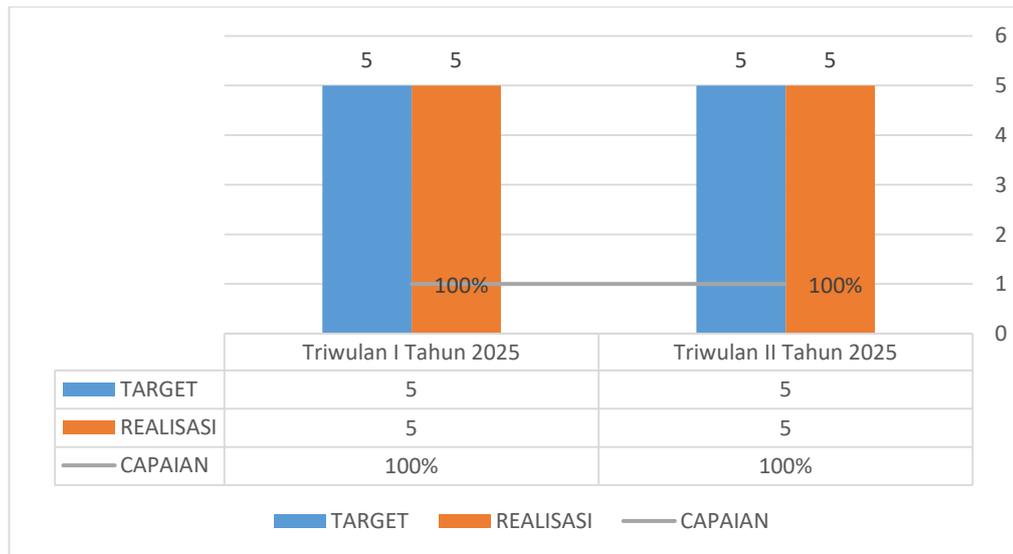
2. IKK 6 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP dihitung dari jumlah pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan yang terdapat di wilayah kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Daya. jumlah pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan dihitung berdasarkan jumlah pelayanan keperintisan yang terlayani. Dalam hal ini Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat melaksanakan subsidi ke 5 pelayanan keperintisan yang terbagi dalam 2 cabang PT ASDP yaitu PT ASDP Cabang Sorong dan PT ASDP Cabang Biak.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan Triwulan II Tahun 2025 sebesar 47,3 % dimana dari 5 Trayek keperintisan angkutan penyeberangan, semuanya beroperasi jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2025 sebesar 5 Trayek maka capaian kinerja mencapai 100 % Pencapaian digambarkan pada grafik di bawah ini :



Gambar II. 2 Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

a.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Dasar Hukum

Sesuai surat keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK 3904 Tahun 2022 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis. Dalam Surat Keputusan tersebut sebanyak 24 (dua puluh empat) nama lintas di bawah naungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat yang terbagi dalam 5 Trayek dan 2 Cabang PT ASDP.

Kronologi Target

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP memiliki target 5 Trayek yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor Keberhasilan

Keberhasilan tercapainya indikator Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP antara lain:

1. Harga tiket yang kompetitif sehingga meringankan masyarakat
2. Jalur yang dilayani untuk masyarakat yang terisolir
3. Kepastian jam operasioanal Keperintisan Angkutan Penyeberangan
4. Satu-satunya pilihan moda transportasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan yang beroperasi melayani masyarakat

Faktor kegagalan

Dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan tercapainya kegiatan Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP. Adapun penyebab kegagalan dalam memenuhi realisasi kinerja dan capaian kinerja yakni :

1. Terdapat efisiensi anggaran sehingga kegiatan tidak dapat berjalan dengan maksimal;
2. Dokumen terkait tagihan mengalami banyak perubahan sehingga harus dilakukan beberapa prosedur sebelum pencairan seperti addendum dan lain-lain;
3. Adanya kerusakan kapal sehingga mengganggu pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan;

Realisasi Kinerja

Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja yakni sebagai berikut :

$$Realisasi = \left(\frac{Realisasi Trip}{Target Trip} \right) \times 100 \%$$

$$Realisasi Kinerja = \frac{740}{1566} \times 100 = 47,3\%$$

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 – 2024 terdapat 30 kabupaten pada wilayah kerja BPTD Kelas II Papua dan BPTD Kelas II Papua Barat yang termasuk dalam daerah tertinggal, namun hanya 12 kabupaten yang memiliki wilayah perairan dengan 5 diantaranya sudah terlayani keperintisan angkutan penyeberangan.

Capaian Kineja

Perhitungan capaian kinerja yakni sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target PK}} \right) \times 100 \%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{5}{5} \times 100 \% = 100 \%$$

Dari 5 lintasan perintis angkutan penyeberangan, seluruh lintasan dilayani sehingga capaian persentase pelaksanaan keperintisan angkutan penyeberangan adalah 100%.

Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait persentase pelaksanaan keperintisan penyeberangan yaitu senilai Rp. 15.712.625.000,- dengan realisasi anggaran hingga akhir Triwulan II sebesar Rp. 10.287.160.906,- atau sebesar 65,5 % dari total anggaran.

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Mengadakan pemeriksaan rutin KMP minimal 3 (tiga) bulan sekali, agar bila terjadi kerusakan pada KMP dapat segera ditangani dan bisa melakukan pelayanan secara maksimal;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keperintisan penyeberangan;
3. Diperlukan pembangunan pelabuhan penyeberangan sehingga lintasan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan dapat bertambah.

II. 3. 3 SK 8 Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP

Sasaran kegiatan Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM dan Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM. Adapun penjelasan kedua indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. IKK 8.1 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM adalah rehabilitasi, perbaikan dan peningkatan pelabuhan penyeberangan pada wilayah kerja Balai Pengelola

Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Daya. Adapun pelabuhan penyeberangan yang dilakukan rehabilitasi, perbaikan dan peningkatan ada 2 (dua) unit yaitu pelabuhan Klademak dan Pelabuhan Arar.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja kegiatan Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM sampai saat ini masih 0 dari target yang di rencanakan sebanyak 2 (dua) unit. Kegiatan masih dalam tahap persiapan dan akan dilaksanakan pada triwulan III. Adapun capaian kinerja kegiatan IKK8.1 dapat digambarkan pada grafik berikut:



a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar Hukum

Berdasarkan DIPA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat nomor SP DIPA-22.03.2.403867/2025 terdapat 2 (dua) unit pelabuhan penyeberangan yang di rehabilitasi, perbaikan dan peningkatan yautu pelabuhan penyeberangan Klademak dan Pelabuhan Penyeberangan Arar.

Kronologi Target

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM memiliki target 2 Unit yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor keberhasilan

Dalam pelaksanaannya terdapat faktor keberhasilan yang mendukung tercapainya kegiatan Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM. Adapun faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan;
2. Tim yang solid dan bekerja sama dengan baik;
- 3.

Faktor kegagalan

Selain faktor kenerhasilan juga terdapat faktor kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM sebagai berikut:

1. Terdapat efisiensi anggaran sehingga anggaran kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan baik;
2. Ketersediaan bahan baku perbaikan;
3. Kurangnya Tenaga kerja yang handal dan kompeten dalam pelaksanaan kegiatan.

Realisasi kinerja

Perhitungan realisasi kinerja kegiatan Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM. Target kinerja kegiatan Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM adalah 2 unit namun realisasi kegiatan sampai Triwulan II masih 0 karena kegiatan belum dilaksanakan.

Realisasi Kinerja IKK8.1

= Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang di tingkatkan pelayanannya

untuk memenuhi SPM s.d tahun (n)

$$Realisasi\ Kinerja\ IKK8.1 = 0$$

Capaian kinerja

Berdasarkan perhitungan realisasi kinerja, Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM pada tahun ini sebanyak 0 unit atau kegiatan belum dilaksanakan maka capaiannya adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja

$$= \frac{\text{Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM}}{\text{target Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 0/2 \times 100\% = 0\%$$

Pagu realisasi dan capaian anggaran

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan dokumen pendukung agar pada saat pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik;
2. Melakukan koordinasi dengan bagian anggaran terkait ketersediaan anggaran kegiatan;
3. Melakukan monitoring dan inventarisasi kebutuhan pelabuhan yang akan di rehabilitasi, perbaiki dan ditingkatkan pelayanannya.

2. IKK 8.2 Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan adalah Pelabuhan penyeberangan kelas I, kelas II, dan kelas III. Sedangkan, Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan.

Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM dihitung dari jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM Tahun 2025 sebanyak 7 lokasi jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebanyak 7 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100 % pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 4 Grafik capaian IKK Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM.



Gambar II. 3 Grafik capaian IKK Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM

a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau, Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda transportasi.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat pada Tahun Anggaran 2025 terdapat 7 lokasi pelabuhan yang sedang beroperasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelabuhan Penyeberangan Klademak Kota Sorong;
2. Pelabuhan Penyeberangan Arar Kab. Sorong;
3. Pelabuhan Penyeberangan Marampa Manokwari;
4. Pelabuhan penyeberangan Folley Kab. Raja Ampat;
5. Pelabuhan Penyeberangan Salawati Kab. Raja Ampat;
6. Pelabuhan Penyeberangan Batanta Kab. Raja Ampat;
7. Pelabuhan Penyeberangan Waigeo Kab. Raja Ampat.

Kronologi target

Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM sebanyak 7 lokasi yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan dimana pada Tahun sebelumnya target Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM sebanyak 8 Lokasi namun karena salah satu pelabuhan penyeberangan yaitu pelabuhan penyeberangan Wasior sudah diserahkan ke Pemda maka tahun ini target Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM menjadi 7 Lokasi.

Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Persentase pelaksanaan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi antara lain:

1. Petugas yang kompeten dibidangnya
2. Kordinasi yang selalu terjalin dengan stakeholder terkait
3. Selalu melaksanakan evaluasi kerja

Potensi Kegagalan

Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 8. Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM mengalami keberhasilan, dimana target kegiatan adalah 100 %. Meskipun capaian kinerja memenuhi target 100%, namun terdapat potensi kegagalan dalam memenuhi realisasi kinerja dan capaian kinerja yakni :

1. Terdapat efisiensi anggaran sehingga kegiatan tidak dapat berjalan dengan maksimal;
2. Kondisi fasilitas pelabuhan yang masih kurang memadai;
3. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi dalam penandatanganan dokumen berlayar.

Perhitungan Realisasi Kinerja

Keberhasilan capaian indikator kinerja dan realisasi kinerja Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

Realisasi Kinerja IKK8.2 =

Jumlah Operasional layanan pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM

s. d tahun (n)

Realisasi Kinerja IKK8.2 = 7

Perhitungan Capaian Kinerja

Berdasarkan perhitungan realisasi kinerja, Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM pada tahun ini sebanyak 7 Lokasi.

Capaian Kinerja

$$= \frac{\text{Jumlah Operasional layanan pelabuhan penyeberangan sesuai SPM}}{\text{target jumlah Operasional layanan pelabuhan penyeberangan sesuai SPM}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 7/7 \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan capaian kinerja dapat diketahui bahwa capaian kinerja Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM sebesar 100%.

Pagu, realisasi, dan capaian keuangan

Adapun anggaran terkait Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM Tahun 2025 yaitu Pagu sesuai Revisi 8 senilai Rp. 2.516.175.000 realisasi anggaran hingga akhir Juni 2025 sebesar Rp. 938.654.069 atau sebesar 37,30 % dari total anggaran.

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Untuk meningkatkan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 8.2 Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM di masa yang akan datang Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat akan melakukan upaya sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi yang baik dengan para coordinator satuan pelayanan pelabuhan penyeberangan yang beroperasi agar kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana;
2. Memenuhi kebutuhan setiap satuan pelayanan seperti kebutuhan alat tulis, SDM dan perlengkapan lainnya;
3. Melakukan revisi anggaran jika terdapat satuan pelayanan yang memerlukan anggaran yang lebih banyak;
4. Meningkatkan kualitas SDM di pelabuhan penyeberangan seperti mengikuti Diklat yang terkait dengan pelabuhan penyeberangan.

II. 3. 4 SK 9 Meningkatnya keselamatan angkutan penumpang dan barang

Sasaran kegiatan Meningkatnya keselamatan angkutan penumpang dan barang memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu :

1. IKK 9.2 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang
2. IKK 9.5 Pengawasan Evaluasi MRL dan Andalalin
3. IKK 9.6 Pengawasan Evaluasi Perlengkapan Jalan
4. IKK 9.7 Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Adapun penjelasan terkait 4 (empat) indikator tersebut adalah sebagai berikut:

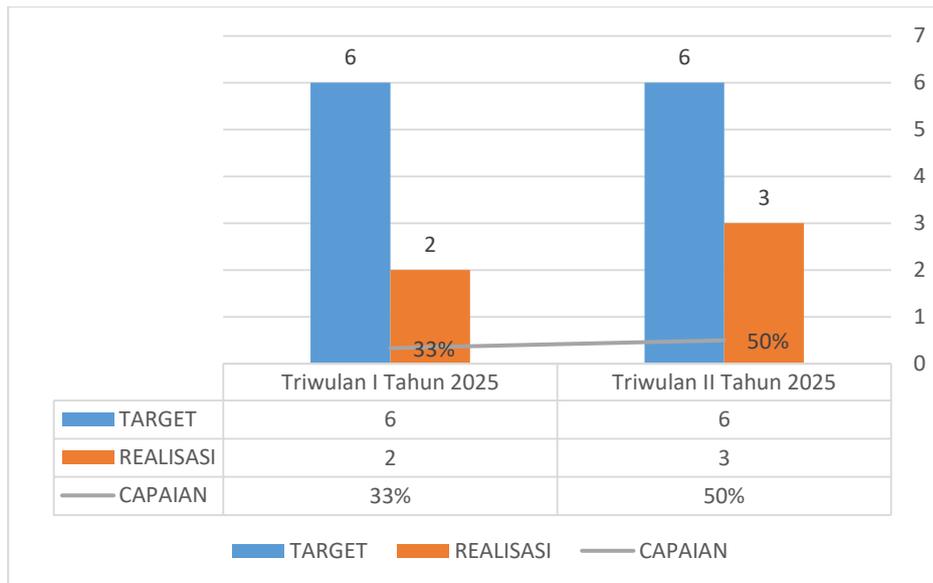
1. IKK 9.2 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengangkutan barang di jalan memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek, termasuk kelaikan kendaraan, muatan, dimensi kendaraan, dokumen kendaraan, dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Dalam hal ini pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat kegiatan Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang terbagi dalam dua kegiatan yaitu Kegiatan Pengendalian dan operasional angkutan barang (odol) di Provinsi Papua Barat Daya dan Ramp Check angkutan barang di Provinsi Papua Barat Daya.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang sebanyak 3 kegiatan jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja 2025 sebesar 6 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 50 % pencapaian ini digambarkan pada Gambar II. 6 Grafik capaian IKK Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang.



Gambar II. 4 Grafik Capaian IKK Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang

a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar Hukum

Berdasarkan PM 60 Tahun 2019 angkutan barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Kronologi Target

Target kegiatan Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang sebanyak 6 kegiatan yang diperoleh dari POK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor Keberhasilan

Dalam pelaksanaannya terdapat faktor yang mendukung keberhasilan kegiatan Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan pihak terkait seperti dinas perhubungan provinsi dan dinas perhubungan kota Sorong serta pihak kepolisian;
2. Kesadaran dari masyarakat akan penting keselamatan dalam transportasi;
3. Ketersediaan fasilitas penimbangan kendaraan bermotor.

Potensi Kegagalan

Selain faktor keberhasilan juga terdapat factor kegagalan Dalam pelaksanaannya kegiatan Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang. Adapun factor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman supir kendaraan terkait peraturan keselamatan angkutan barang yang berlebih;
2. Kurangnya fasilitas jembatan timbang dan alat ukur kendaraan bermotor;
3. Sanksi yang kurang efektif sehingga tidak memberi efek jera terhadap pelaku Odol.

Realisasi Kinerja

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang yaitu sebesar:

Realisasi Kinerja IKK9.2 =

Jumlah kegiatan pengawasan operasional angkutan barang s. d tahun (n)

$$Realisasi\ Kinerja\ IKK9.2 = 3$$

Capaian kinerja

Berdasarkan perhitungan realisasi kinerja, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang sebesar 3 kegiatan maka perhitungan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja

$$= \frac{\text{Realisasi Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang}}{\text{Target Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{3}{6} \times 100 = 50\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, dapat diketahui untuk capaian kinerja Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang yakni 50%.

Realisasi keuangan

Adapun anggaran terkait Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang Tahun 2025 yaitu senilai Rp. 396.800.000 realisasi anggaran hingga akhir Juni 2025 sebesar Rp. 149.426.000 atau sebesar 37,66 % dari total anggaran.

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan sosialisasa kepada masyarakat akan dampak buruk kelebihan muatan maupun kelebihan dimensi pada angkutan barang;
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat khususnya bidang pengujian kendaraan bermotor;
3. Memberikan sanksi yang berat agar memberi efek jera pada kendaraan odol.

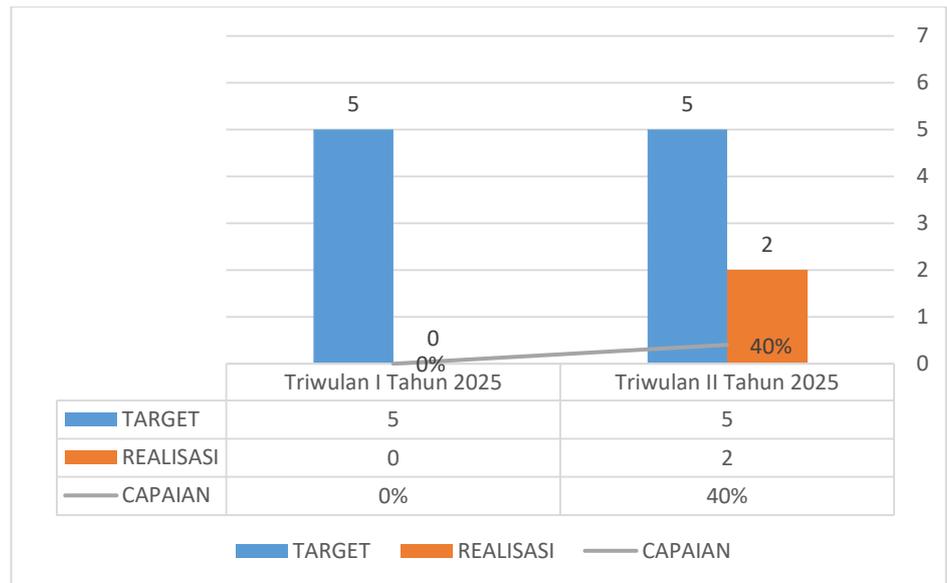
2. IKK 9.5 Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Pengawasan Evaluasi MRLL (Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas) adalah proses pemantauan dan penilaian terhadap implementasi kebijakan, rencana, dan tindakan dalam bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas. Tujuannya adalah untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan keamanan lalu lintas serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan. Pengawasan evaluasi Andalalin adalah proses pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang telah disetujui. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kegiatan atau usaha yang mendapatkan persetujuan Andalalin beroperasi sesuai dengan ketentuan dan tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lalu lintas.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja kegiatan Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin sampai dengan Triwulan II adalah sebanyak 2 kegiatan jika dibandingkan dengan target kegiatan sebanyak 5 kegiatan maka capaian kegiatan Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin adalah sebesar 40%.



a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar Hukum

Berdasarkan PM 96 Tahun 2015 Manajemen rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usahan dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas. Berdasarkan PM 17 Tahun 2021 analisis dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan.

Kronologi target

Target kegiatan Pengawasan Evaluasi MRLL (Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas) dan Andalalin sebanyak 5 kegiatan yang diperoleh dari POK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor keberhasilan

Faktor keberhasilan tercapainya kegiatan Pengawasan Evaluasi MRLL (Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas) dan Andalalin adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan yang baik terkait lokasi dilaksanakannya Evaluasi MRLL (Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas) dan Andalalin;
2. Kesadaran dari seluruh pihak akan pentingnya pengaturan lalu lintas;
3. Kerja sama yang baik antara semua pihak dalam pelaksanaan Evaluasi MRLL (Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas) dan Andalalin seperti pihak kepolisian, Dinas Perhubungan, dan masyarakat umum.

Faktor kegagalan

Selain faktor keberhasilan juga terdapat potensi kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan Evaluasi MRLL (Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas) dan Andalalin. Potensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kerja sama yang baik dengan pihak-pihak terkait;
2. Kondisi jalan atau lokasi andalalin yang sulit untuk dilakukan evaluasi;
3. Kurangnya sumberdaya manusia yang kompeten di bidang andalalin.

Realisasi kinerja

Perhitungan realisasi kinerja

Realisasi Kinerja IKK9.5 =

Jumlah Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin s.d Triwulan II

$$Realisasi\ Kinerja\ IKK9.5 = 2$$

Capaian kinerja

Berdasarkan perhitungan realisasi kinerja, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Kegiatan Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin sebesar 2 kegiatan maka perhitungan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin}}{\text{Target Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{2}{5} \times 100 = 40\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, dapat diketahui untuk capaian kinerja Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin yakni 40%.

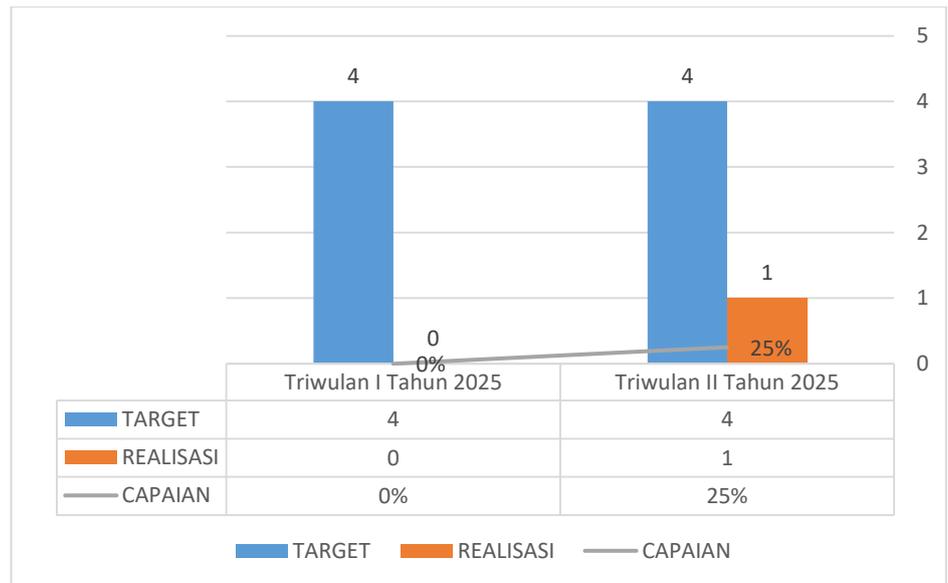
Pagu realisasi capaian anggaran

Adapun anggaran terkait Jumlah Kegiatan pengawasan Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin Tahun 2025 yaitu senilai Rp. 396.800.000 realisasi anggaran hingga akhir Juni 2025 sebesar Rp. 149.426.000 atau sebesar 37,66 % dari total anggaran.

- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang kegiatan Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin adalah:
1. Meningkatkan kerja sama yang baik dengan pihak terkait;
 2. Melakukan monitoring atau pemantauan secara langsung pada lokasi kegiatan pengawasan MRLL dan Andalalin;
 3. Memberikan sosialisasi terkait andalalin kepada pengusaha atau masyarakat yang akan membuat gedung atau fasilitas yang lain.

3. IKK 9.6 Pengawasan Evaluasi Perlengkapan Jalan

- a.1. Definisi Indikator Kinerja
Pengawasan dan evaluasi perlengkapan jalan adalah proses penting dalam memastikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Ini melibatkan pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian terhadap berbagai fasilitas jalan, seperti rambu lalu lintas, marka jalan, lampu penerangan jalan, dan lainnya, untuk memastikan mereka berfungsi dengan baik dan sesuai standar.
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Target kegiatan Pengawasan dan evaluasi perlengkapan jalan sebanyak 4 kegiatan dan sampai dengan Triwulan II sudah terealisasi sebanyak 1 kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga capaian kinerja kegiatan Pengawasan dan evaluasi perlengkapan jalan adalah sebesar 25%.



a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar Hukum

Berdasarkan PM 48 Tahun 2023 Alat pengendali Pengguna Jalan digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan dan ukuran kendaraan pada ruas-ruas Jalan. Perlengkapan yang dimaksud dapat berupa:

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan; dan
- f. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Kronologi target

Target kegiatan Pengawasan dan evaluasi perlengkapan jalan sebanyak 4 kegiatan yang diperoleh dari POK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor keberhasilan

Faktor keberhasilan tercapainya kegiatan kegiatan Pengawasan dan evaluasi perlengkapan jalan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan yang baik dapat membantu memastikan keberhasilan pengawasan perlengkapan jalan;
2. Tersedianya sumberdaya yang memadai seperti anggaran, tenaga kerja dan peralatan;
3. Koordinasi yang baik dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah, kontraktor dan masyarakat.

Faktor kegagalan

Selain faktor keberhasilan juga terdapat potensi kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan evaluasi perlengkapan jalan. Potensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan dokumen dengan kenyataan di lapangan;
2. Ketersediaan sumber daya manusia yang handal di bidang perlengkapan jalan;
3. Tersedia anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Realisasi kinerja

Perhitungan realisasi kinerja

Realisasi Kinerja IKK9.6 =

Jumlah PPengawasan dan evaluasi perlengkapan jalan s. d Triwulan II

$$Realisasi Kinerja IKK9.6 = 1$$

Capaian kinerja

Berdasarkan perhitungan realisasi kinerja, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Kegiatan Pengawasan dan evaluasi perlengkapan jalan sebesar 1 kegiatan maka perhitungan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Pengawasan dan evaluasi perlengkapan jalan}}{\text{Target Pengawasan dan evaluasi perlengkapan jalan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{1}{4} \times 100 = 25\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, dapat diketahui untuk capaian kinerja Pengawasan dan evaluasi perlengkapan jalan yakni 25%.

Pagu realisasi capaian anggaran

Adapun anggaran terkait Jumlah Kegiatan Pengawasan dan evaluasi perlengkapan jalan Tahun 2025 yaitu senilai Rp.

382.002.000 realisasi anggaran hingga akhir Juni 2025 sebesar Rp. 53.692.000 atau sebesar 14,05 % dari total anggaran.

- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang kegiatan Pengawasan dan evaluasi perlengkapan jalan adalah:
1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak penyedia atau kontraktor terkait pelaksanaan kegiatan di lapangan;
 2. Melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang perlengkapan jalan;
 3. Melakukan perencanaan yang baik agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

4. IKK 9.7 Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

- a.1. Definisi Indikator Kinerja
Pengawasan dan evaluasi pemeliharaan perlengkapan jalan adalah proses untuk memastikan bahwa semua fasilitas dan peralatan yang terkait dengan jalan, seperti rambu lalu lintas, marka jalan, dan lampu jalan, berfungsi dengan baik dan dipelihara secara teratur. Hal ini penting untuk menjaga keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan pengguna jalan. Pengawasan dan evaluasi pemeliharaan perlengkapan jalan dihitung dari jumlah Pengawasan dan evaluasi pemeliharaan perlengkapan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Target kegiatan Pengawasan dan evaluasi pemeliharaan perlengkapan jalan adalah 1 kegiatan jika dibandingkan dengan realisasi kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah 0 kegiatan maka capaian kegiatan sampai saat ini masih 0 %.



a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar Hukum

Berdasarkan PM 48 Tahun 2023 Pemeliharaan alat pengendali dan pengaman pengguna jalan dilakukan secara berkala dan incidental. Pemeliharaan berkala dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali sedangkan pemeliharaan secara incidental dilakukan jika ditemukan adanya kerusakan pada alat pengendali dan pengaman pengguna jalan.

Kronologi target

Target kegiatan Pengawasan dan evaluasi pemeliharaan perlengkapan jalan 1 kegiatan yang diperoleh dari POK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor keberhasilan

Faktor keberhasilan tercapainya kegiatan Pengawasan dan evaluasi pemeliharaan perlengkapan jalan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan berjalan sesuai dengan rencana kontrak;
2. Ketersediaan anggaran untuk melakukan survey di lokasi kegiatan;
3. Koordinasi yang baik dengan pihak kontraktor dan pihak lain agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Faktor kegagalan

Selain faktor keberhasilan juga terdapat potensi kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan evaluasi pemeliharaan perlengkapan jalan. Potensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dengan alasan ketersediaan bahan baku;
2. Adanya efisiensi anggaran sehingga kegiatan tidak dapat terlaksana dengan efisien;
3. Lokasi pengadaan yang cukup jauh sehingga akses ketempat pelaksanaan kegiatan sedikit sulit.

Realisasi kinerja
Perhitungan realisasi kinerja

Realisasi Kinerja IKK9.7 =

Jumlah Pengawasan dan evaluasi pemeliharaan perlengkapan jalan s. dTriwulan II

Realisasi Kinerja IKK9.7 = 0

Capaian kinerja

Berdasarkan perhitungan realisasi kinerja, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Kegiatan Pengawasan dan evaluasi pemeliharaan perlengkapan jalan sebesar 0 kegiatan maka perhitungan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja

$$= \frac{\text{Realisasi Pengawasan dan evaluasi pemeliharaan perlengkapan jalan}}{\text{Target Pengawasan dan evaluasi pemeliharaan perlengkapan jalan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{0}{1} \times 100 = 0\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, dapat diketahui untuk capaian kinerja Pengawasan dan evaluasi pemeliharaan perlengkapan jalan yakni 0%.

Pagu realisasi capaian anggaran

Adapun anggaran terkait Jumlah Kegiatan Pengawasan dan evaluasi pemeliharaan perlengkapan jalan Tahun 2025 yaitu senilai

Rp. 84.760.000 hingga akhir Juni 2025 belum terdapat realisasi anggaran.

- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang Kegiatan Pengawasan dan evaluasi pemeliharaan perlengkapan jalan adalah:
1. Melakukan koordinasi yang baik dengan pihak terkait agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana;
 2. Melakukan perencanaan yang baik agar dimasa yang akan datang tidak terdapat kendala yang berat;
 3. Melakukan monitoring terlebih dahulu sebelum menentuka lokasi pemasangan Faskes.

II. 3. 5 SK 10 : Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety

Sasaran kegiatan Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah. Adapun penjelasan indicator tersebut adalah sebagai berikut:

1. IKK10.2 Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah adalah kegiatan yang bertujuan untuk memastikan keakuratan alat-alat uji yang digunakan dalam pengujian kendaraan bermotor. Hal ini penting untuk menjaga keselamatan lalu lintas dan keandalan hasil pengujian. Pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Daya kegiatan Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala terbagi dalam 3 kegiatan yaitu:

1. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya;
2. Pemeliharaan Alat Kalibrasi dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor;
3. Perawatan dan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor Non Statis.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Target kinerja Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah yaitu 6 kegiatan jika dibandingka dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II yaitu 0 atau kegiatan belum

dilaksanakan karena anggaran kegiatan yang masih terblokir sehingga capaian kinerja sampai saat ini masih 0%.



a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar hukum

Berdasarkan PM 19 Tahun 2021 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor bahwa pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan yang menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandeng, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Kalibrasi adalah proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkan nya dengan standar/tolak ukur. Kalibrasi diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran yg dilakukan akurat dan konsisten dengan instrumen lainnya. Pada pasal 53 ayat (1) "Untuk menjamin keakurasian peralatan uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 wajib dilakukan kalibrasi secara berkala 1 (satu) tahun sekali.

Kronologi target

Tahun 2025, Indikator Kinerja Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah memiliki target 6 kegiatan yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor keberhasilan

Faktor keberhasilan tercapainya kegiatan Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah adalah sebagai berikut:

1. Adanya permintaan dari Dishub Kab/ Kota untuk dilaksanakannya standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor.
2. Kelengkapan Alat uji yang akan di kalibrasi.
3. Peralatan yang akan di uji sudah terstandar.

Faktor kegagalan

Selain faktor keberhasilan juga terdapat potensi kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah. Potensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Infrastruktur pengujian berkala kendaraan bermotor belum memadai dan belum dilakukan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor;
2. Belum adanya SDM kompeten untuk menangani pengujian berkala kendaraan bermotor;
3. Fasilitas penunjang pengujian berkala kendaraan bermotor yang belum lengkap.

Realisasi kinerja

Realisasi pelaksanaan kegiatan Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

Realisasi Kinerja IKK10.2 =

Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah *s. d tahun (n)*

$$Realisasi\ Kinerja\ IKK10.2 = 0$$

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi kinerja, dapat diketahui untuk realisasi kinerja Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah yakni sebesar 0.

Capaian Kinerja

Capaian Kinerja

$$= \frac{Realisasi\ Jumlah\ kegiatan\ terkait\ uji\ kalibrasi\ alat\ uji\ berkala\ di\ daerah}{Target\ Jumlah\ kegiatan\ terkait\ uji\ kalibrasi\ alat\ uji\ berkala\ di\ daerah} \times 100\%$$

$$Capaian\ Kinerja = \frac{0}{6} \times 100 = 0\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, dapat diketahui untuk capaian kinerja Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah yakni 0%.

Pagu realisasi capaian anggaran

Adapun anggaran terkait Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah Tahun 2025 yaitu senilai Rp. 400.000.000 hingga akhir Juni 2025 belum terdapat realisasi anggaran.

- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:
1. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat berencana melakukan pinjam pakai mobil uji keliling kepada pengujian yang sudah terakreditasi agar bisa menghasilkan BLUe dan mendorong pengujian untuk mengadakan system BLUe;
 2. Melakukan sosialisasi mengenai peraturan kalibrasi dan akreditasi agar beberapa kabupaten yang belum memiliki alat uji terdorong untuk melakukan pengadaan alat uji;
 3. Meningkatkan kompetensi SDM petugas yang akan melaksanakan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor.

II. 3. 6 SK 11 Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan

Sasaran kegiatan Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis. Adapun penjelasan indicator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis

a.1. Definisi Indikator Kinerja

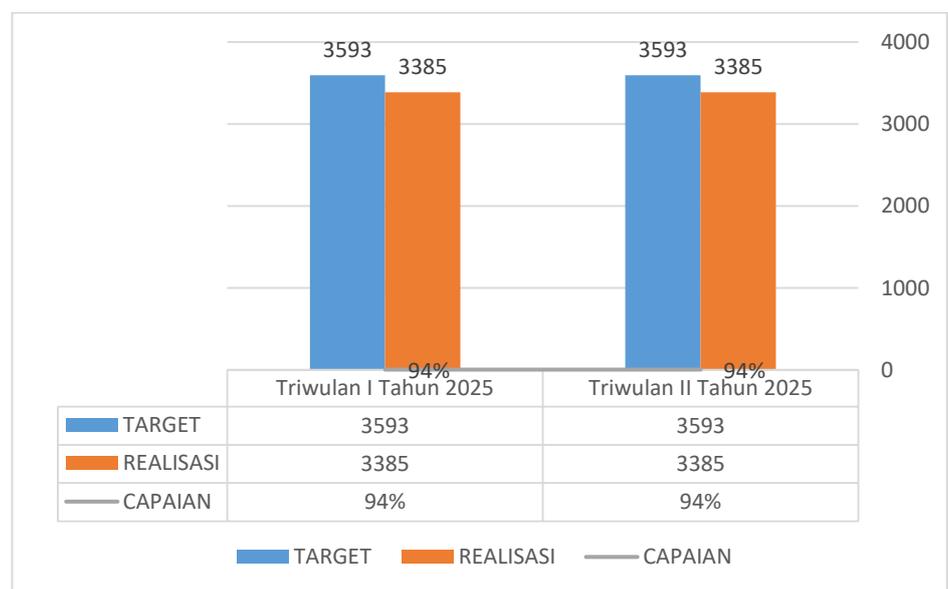
Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan meliputi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, penerangan jalan, serta alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. Fasilitas ini penting untuk keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KU.001/1/12/DJPD/2025 tanggal 6 Februari 2025 perihal Efisiensi Belanja Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sehingga mengakibatkan beberapa kegiatan kontraktual tidak dapat terlaksana. Pada Tahun 2025

BPTD Kelas II Papua barat hanya melaksanakan dua kegiatan pengadaan dan pemasangan Perlengkapan jalan yaitu pengadaan dan pemasangan paku jalan Bulat (Tempered) dan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pagar Pengaman Jalan (Guadrail).

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Target kinerja Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis sebanyak 3.593 Unit jika dibandingkan dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II sebanyak 3.385 unit maka capaian kinerja mencapai 94,21% pencapaian ini digambarkan pada Gambar



a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar Hukum

Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur LaluLintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan. Pagar pengaman adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai pencegah pertama bagi kendaraan bermotor yang tidak dapat dikendalikan lagi agar tidak keluar dari jalur lalu lintas

Kronologi target

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis memiliki target 3.593 Unit yang diperoleh dari

capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Kegiatan Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis antara lain:

1. Kondisi dilapangan yang mendukung, seperti cuaca;
2. Kontrak pekerjaan tepat waktu;
3. Ketersediaan bahan baku faskes yang akan dipasang.

Faktor kegagalan

Selain faktor keberhasilan juga terdapat potensi kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis. Potensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlengkapan jalan yang memerlukan perbaikan/pemeliharaan, jumlahnya banyak sedangkan anggaran yang tersedia untuk pemeliharaan perlengkapan jalan, terbatas;
2. Suplai bahan material dan logistik terlambat;
3. Keterlambatan penyiapan dokumen pendukung dari pemerintah daerah untuk realisasi kegiatan bantuan teknis perlengkapan jalan.

Realisasi kinerja

Realisasi Kinerja IKK11.1 =

Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan *s.d tahun (n)*

Realisasi Kinerja IKK11.1 = 3.385 Unit

Dari perhitungan realisasi kinerja, dapat diketahui untuk realisasi kinerja Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis sebanyak 3.385 Unit

Capaian kinerja

Perhitungan capaian kinerja yakni sebagai berikut:

% Capaian kinerja

$$= \frac{\text{realisasi pengadaan dan pemasangan Faskes}}{\text{Target pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{3.385}{3.593} \times 100 = 94\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa capaian kinerja Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan spesifikasi teknis yakni 94%.

Pagu realisasi capaian anggaran

Adapun total Pagu anggaran untuk Kegiatan Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan spesifikasi teknis yaitu sebesar Rp. 3.176.501.063 dengan realisasi anggaran hingga Triwulan II sebesar Rp 3.457.582.819 atau sebesar 77,4% dari total nilai kontrak.

- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:
1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditentukan agar kegiatan berjalan dengan lancar dan pencapaian kinerja lebih optimal;
 2. Melakukan pengawasan yang baik terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan di lapangan;
 3. Mempersiapkan rencana kebutuhan kegiatan pengadaan dan pemasangan faskes ditahun yang akan datang.

II. 3. 7 SK 12 Meningkatkan kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan

Sasaran kegiatan Meningkatkan kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu:

1. IKK 12.1 Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda
2. IKK 12.2 Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda

Adapun penjelasan terkait IIK tersebut adalah sebagai berikut:

1. IKK 12.1 Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan

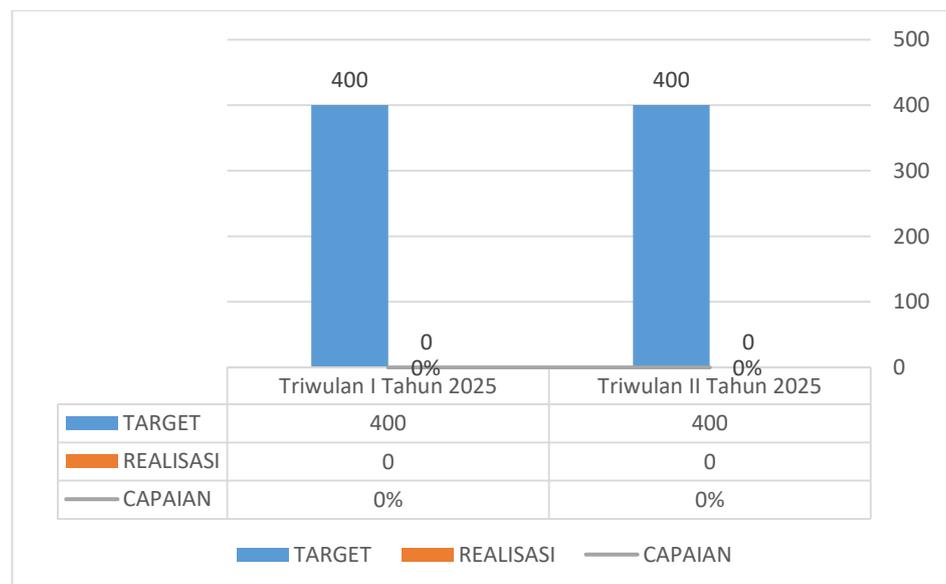
untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi.

Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat).

Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan disetiap Balai Pengelola Transportasi Darat dan pelaksanaan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Target kinerja Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda sebanyak 400 Orang jika dibandingkan dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II sebanyak 0 Orang maka capaian kinerja mencapai 0% pencapaian ini digambarkan pada Gambar



Realisasi kinerja kegiatan jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi darat masih 0 karena pada rencana aksi Tahun 2025 kegiatan akan dilaksanakan pada bulan September 2025.

a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar hukum

Sesuai dengan Pasal 208 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, tentang Budaya Keamanan dan

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan Ayat 2 Butir b "Sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Kronologi target

Tahun 2025, Indikator Kinerja Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda memiliki target 400 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda antara lain:

1. Tingginya pengguna Jasa Angkutan Umum;
2. Petugas dipelabuhkan penyeberangan menyampaikan informasi keselamatan di lingkungan pelabuhan penyeberangan sebelum kapal berangkat;
3. Petugas Menyampaikan informasi dengan Jelas dan singkat.

Faktor kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda antara lain:

1. Terdapat efisiensi anggaran sehingga sampai saat ini anggaran kegiatan Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda sampai saat ini masih terblokir;
2. Tidak tersampainya informasi keselamatan karena penumpang tidak memperhatikan
2. Kemungkinan Petugas tidak ada di tempat saat Bus akan berangkat

Realisasi kinerja

Pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat kegiatan Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda akan dilaksanakan pada bulan September 2025

Realisasi Kinerja Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda Tahun 2025 Triwulan II terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

Realisasi Kinerja

= Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapat sosialisasi pada PNKJ

Realisasi Kinerja = 0

Capaian kinerja

Perhitungan Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi kinerja, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi darat adalah 0 orang

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Jumlah masyarakat Tersosialisasi}}{\text{Target Masyarakat Tersosialisasi}}$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{0}{400} \times 100 = 0 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, dapat diketahui untuk capaian kinerja untuk Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi darat yakni 0%.

Pagu realisasi capaian anggaran

Adapun anggaran terkait Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan total Pagu yaitu Rp. 300.000.000 namun pelaksanaan kegiatan masih menunggu hasil efisiensi anggaran apakah kegiatan dapat dilaksanakan atau tidak.

- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:
1. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat akan melakukan pengusulan untuk kegiatan sosialisasi tentang keselamatan Transportasi Darat yang lebih besar dengan sasaran masyarakat yang lebih luas.

2. Meningkatkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan memberikan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Mengoptimalkan sosial media sebagai sarana promosi kegiatan dan sarana penyebaran informasi terkait keselamatan transportasi darat.

2. IKK12.2 Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda merupakan pendidikan sadar lalu lintas usia dini, sering disebut SALUD. SALUD adalah upaya memberikan pemahaman tentang aturan lalu lintas dan pentingnya keselamatan di jalan kepada anak-anak sejak usia dini. Program ini bertujuan membentuk karakter anak-anak yang disiplin dan bertanggung jawab dalam berlalu lintas, serta menanamkan kebiasaan baik yang akan terbawa hingga dewasa.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Target kinerja Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda sebanyak 100 Orang jika dibandingkan dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II sebanyak 0 Orang maka capaian kinerja mencapai 0% pencapaian ini digambarkan pada Gambar



a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar hukum

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 pada pasal 208 bahwa upaya membangun dan mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan melalui:

- a. Pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
- b. Sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Pemberian penghargaan terhadap tindakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib; dan
- e. Penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.

Kronologi target

Tahun 2025, Indikator Kinerja Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda memiliki target 100 orang yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda antara lain:

1. Kerjasama yang baik antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dengan pihak sekolah untuk memberikan sosialisasi kepada anak usia dini;
2. Penyampaian materi sosialisasi yang menarik dan mudah dipahami oleh anak usia dini;
3. Ketersediaan anggaran untuk melaksanakan sosialisasi.

Faktor kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda antara lain:

1. Kuarangya kesadaran orang tua, guru maupun masyarakat akan penting pengetahuan tentang pentingnya pengetahuan keselamatan transportasi sejak anak masih usia dini;
2. Adanya efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara berkala;
3. Kurangnya

Realisasi kinerja

Pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat kegiatan Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda akan dilaksanakan pada bulan September 2025.

Realisasi Kinerja Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda Tahun 2025 Triwulan II terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

Realisasi Kinerja

= Jumlah kumulatif Anak Usia Dini yang mendapat sosialisasi LLAJ

Realisasi Kinerja = 0

Capaian kinerja

Perhitungan Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi kinerja, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda adalah 0 orang

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Anak Usia Dini yang Tersosialisasi}}{\text{Target Anak Usia Dini Yang Tersosialisasi}}$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{0}{100} \times 100 = 0\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, dapat diketahui untuk capaian kinerja untuk Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda yakni 0%.

Pagu realisasi capaian anggaran

Adapun anggaran terkait Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai

pedoman pada lokasi yang berbeda total Pagu yaitu Rp. 107.143.000 namun pelaksanaan kegiatan masih menunggu hasil efisiensi anggaran apakah kegiatan dapat dilaksanakan atau tidak.

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan sosialisasi tentang keselamatan transportasi bagi anak usia dini dengan materi yang menarik dan mudah dipahami anak-anak;
2. Melakukan koordinasi kebagian anggaran terkait blokir anggaran kegiatan apakah ada kemungkinan untuk pembukaan blokir anggaran;
3. Melakukan sosialisasi melalui media sosial maupun media cetak seperti spanduk, baliho dan lain-lain.

II. 3. 8 SK 8 Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal

Sasaran kegiatan Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal memiliki 10 (sepuluh) Indikator Kinerja yaitu:

1. IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat
2. IKK 4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat
3. IKK 4.3 Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan
4. IKK 4.4 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat
5. IKK 4.5 Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan
6. IKK 4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat
7. IKK 4.7 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen
8. IKK 4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)
9. IKK 4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
10. IKK 4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja

Adapun penjelasan terkait IKK diatas adalah sebagai berikut:

1. IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

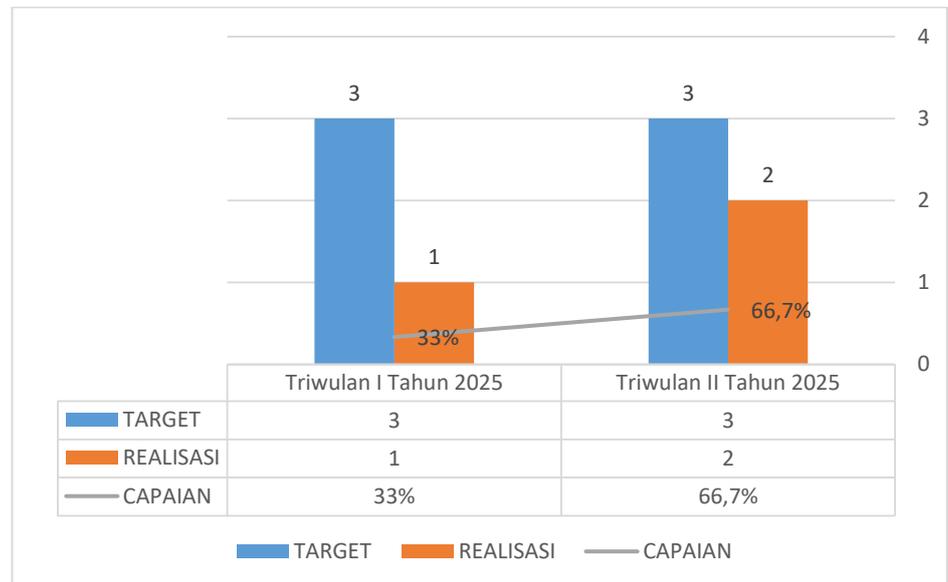
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan mencakup perumusan kebijakan, penyusunan rencana strategis, program, dan anggaran di bidang transportasi darat. Ini termasuk perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana transportasi darat, serta sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) pad Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat terdiri dalam 3 kegiatan yaitu:

1. Penyusunan RKKL Pagu Kebutuhan;
2. Penyusunan RKKL Pagu Indikatif;
3. Penyusunan RKKL Pagu Alokasi.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Target kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebanyak 3 kegiatan jika dibandingkan dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II sebanyak 2 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 66,7%.



a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar Hukum

Berdasarkan PM 6 Tahun 2023 menyatakan bahwa Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, pengelolaan urusan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI); dan

- b. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

Kronologi Target

Target kegiatan Perencanaan Pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebanyak 3 kegiatan yang diperoleh dari POK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Perencanaan Pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat antara lain:

1. Kerjasama yang baik antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dengan pihak pemerintah Daerah terkait kebutuhan pemerintah daerah dan ketersediaan lahan untuk pembangunan;
2. Data dukung yang terpenuhi untuk setiap usulan kegiatan pembangunan;
3. Sumber daya manusia yang kompeten dibidang perencanaan.

Faktor kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Perencanaan Pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat antara lain:

1. Kurangnya ketersediaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan perencanaan;
2. Kondisi wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya yang masih sering terjadi komprisk;
3. Kurangnya data dukung dari pemerintah daerah terkait permintaan pembangunan fasilitas transportasi Darat.

Realisasi kinerja

Perhitungan realisasi kinerja

Realisasi Kinerja IKK4.1 =

Jumlah Perencanaan Pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Realisasi Kinerja IKK4.1 = 2

Capaian kinerja

Berdasarkan perhitungan realisasi kinerja, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebanyak 2 kegiatan dari target yang ditetapkan sebanyak 3 Kegiatan maka perhitungan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja

$$= \frac{\text{Realisasi Perencanaan Pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat}}{\text{Target Perencanaan Pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{2}{3} \times 100 = 66,7\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, dapat diketahui untuk capaian kinerja Perencanaan Pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yakni 66,7%.

Pagu realisasi capaian keuangan

Adapun anggaran terkait Perencanaan Pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025 yaitu senilai Rp. 1.885.240.000 realisasi anggaran hingga akhir Juni 2025 sebesar Rp. 449.584.500 atau sebesar 23,85 % dari total anggaran. Anggaran yang digunakan adalah Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat pada bagian pengelolaan bidang ketatausahaan.

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Selalu melakukan koordinasi yang baik dengan pihak pemerintah daerah terkait pembangunan demi kemajuan Papua Barat Daya khususnya bidang transportasi;
2. Melengkapi data dukung yang di perlukan terkait perencanaan;
3. Membuat rencana strategis yang jelas dan terukur, yang mengacu pada visi, misi, dan tujuan pembangunan transportasi darat nasional.

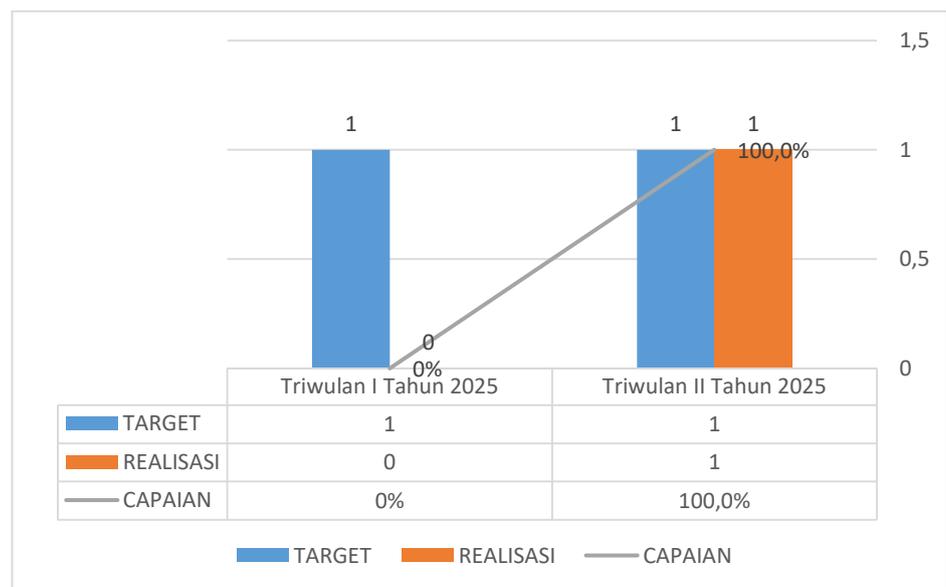
2. IKK 4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan mencakup penyusunan dan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta pemantauan dan evaluasi kinerjanya. Ini termasuk penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran capaian kinerja, dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Target kinerja Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebanyak 1 dokumen jika dibandingkan dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II sebanyak 1 dokumen maka capaian kinerja mencapai 100%.



a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar Hukum

Berdasarkan PM 85 Tahun 2020 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan Pelaporan Kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Kronologi Target

Target Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebanyak 1 dokumen yang diperoleh dari POK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat antara lain:

1. Perencanaan kinerja yang baik sehingga tidak mengalami kesulitan dalam peleksanaannya;
2. Sumber daya manusia yang kompeten dibidang Kinerja;
3. Tersediaanya panduan yang lengkap dalam penyusunan dokumen SAKIP.

Faktor kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat antara lain:

1. Dokumen kegiatan SAKIP di Tahun sebelumnya yang kurang lengkap;
2. Adanya pergantian PIC sehingga PIC yang baru perlu penyesuaian;
3. Kurangnya kegiatan pengembangan SDM seperti Diklat untuk kegiatan SAKIP.

Realisasi kinerja

Perhitungan realisasi kinerja

Realisasi Kinerja IKK4.2 =

Jumlah Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)

Realisasi Kinerja IKK4.2 = 1

Capaian kinerja

Berdasarkan perhitungan realisasi kinerja, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebanyak 1 dokumen dari

target yang ditetapkan sebanyak 1 dokumen maka perhitungan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja

$$= \frac{\text{Realisasi Jumlah Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)}}{\text{Target Jumlah Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{1}{1} \times 100 = 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, dapat diketahui untuk capaian kinerja Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yakni 100%.

Pagu realisasi capaian keuangan

Adapun anggaran Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025 yaitu senilai Rp. 1.885.240.000 realisasi anggaran hingga akhir Juni 2025 sebesar Rp. 449.584.500 atau sebesar 23,85 % dari total anggaran. Anggaran yang digunakan adalah Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat pada bagian pengelolaan bidang ketatausahaan.

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Membuat perencanaan yang matang dan dapat dicapai sehingga capaian kinerja dapat memperoleh hasil yang baik;
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui kegiatan Diklat maupun mimtek terkait kegiatan SAKIP;
3. Melakukan digitalisasi arsip untuk dokumen kegiatan SAKIP agar dokumen dapat tersimpan dengan baik.

3. IKK 4.3 Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Kegiatan terkait Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) di Kementerian Perhubungan mencakup penilaian dan

peningkatan tingkat kematangan SPIP di lingkungan kementerian. Ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kegiatan terkait Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) terdiri atas dua kegiatan yaitu penyusunan SPIP dan penyusunan Dokumen Manajemen Resiko (MR).

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Target kinerja Kegiatan terkait Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) di Kementerian Perhubungan sebanyak 2 kegiatan jika dibandingkan dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II sebanyak 1 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 50%.



a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar Hukum

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Resiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan Penerapan Manajemen

Risiko memenuhi prinsip yang bertujuan menciptakan dan melindungi nilai organisasi melalui:

- a. prinsip terintegrasi;
- b. prinsip terstruktur dan komprehensif;
- c. prinsip disesuaikan;
- d. prinsip inklusif;
- e. prinsip dinamis;
- f. prinsip ketersediaan informasi terbaik;
- g. prinsip faktor manusia dan budaya;
- h. prinsip perbaikan berkelanjutan.

Kronologi Target

Target kegiatan Kegiatan terkait Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) di Kementerian Perhubungan sebanyak 2 kegiatan yang diperoleh dari POK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Kegiatan terkait Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) di Kementerian Perhubungan antara lain:

1. Identifikasi dan penilaian risiko yang komprehensif sangat penting untuk mengetahui potensi masalah dan kelemahan dalam organisasi;
2. Dukungan penuh dan komitmen dari pimpinan instansi pemerintah;
3. Penerapan kegiatan pengendalian yang efektif, seperti prosedur operasional standar (SOP), otorisasi, verifikasi, dan rekonsiliasi, akan membantu mencegah dan mendeteksi kesalahan atau penyimpangan.

Faktor kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap Kegiatan terkait Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) di Kementerian Perhubungan antara lain:

1. Keterbatasan anggaran, tenaga ahli, dan fasilitas pendukung dapat menjadi kendala dalam penerapan SPIP
2. Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kompeten juga dapat menghambat efektivitas SPIP
3. Kegagalan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon resiko yang dihadapi organisasi

Realisasi kinerja

Perhitungan realisasi kinerja

Realisasi Kinerja IKK4.3 =

Jumlah Kegiatan terkait Maturitas SPIP di Kementerian Perhubungan

Realisasi Kinerja IKK4.3 = 1

Capaian kinerja

Berdasarkan perhitungan realisasi kinerja, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja terhadap Kegiatan terkait Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) di Kementerian Perhubungan sebanyak 1 kegiatan dari target yang ditetapkan sebanyak 2 kegiatan maka perhitungan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja

$$= \frac{\text{Realisasi Kegiatan terkait Maturitas SPIP di Kementerian Perhubungan}}{\text{Target Kegiatan terkait Maturitas SPIP di Kementerian Perhubungan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{1}{2} \times 100 = 50\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, dapat diketahui untuk capaian kinerja Kegiatan terkait Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) di Kementerian Perhubungan yakni 50%.

Pagu realisasi capaian keuangan

Adapun anggaran Kegiatan terkait Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) di Kementerian Perhubungan Tahun 2025 yaitu senilai Rp. 1.885.240.000 realisasi anggaran hingga akhir Juni 2025 sebesar Rp. 449.584.500 atau sebesar 23,85 % dari total anggaran. Anggaran yang digunakan adalah Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat pada bagian pengelolaan bidang ketatausahaan.

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang SPIP seperti mengikuti diklat, bimtek dan lain-lain;
2. Meningkatkan kualitas dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon resiko yang dihadapi organisasi;
3. Melengkapi data dukung yang sesuai dan melakukan digitalisasi sehingga ketika terjadi perubahan PIC kegiatan SPIP dan MR dokumen yang di perlukan masih tersimpan.

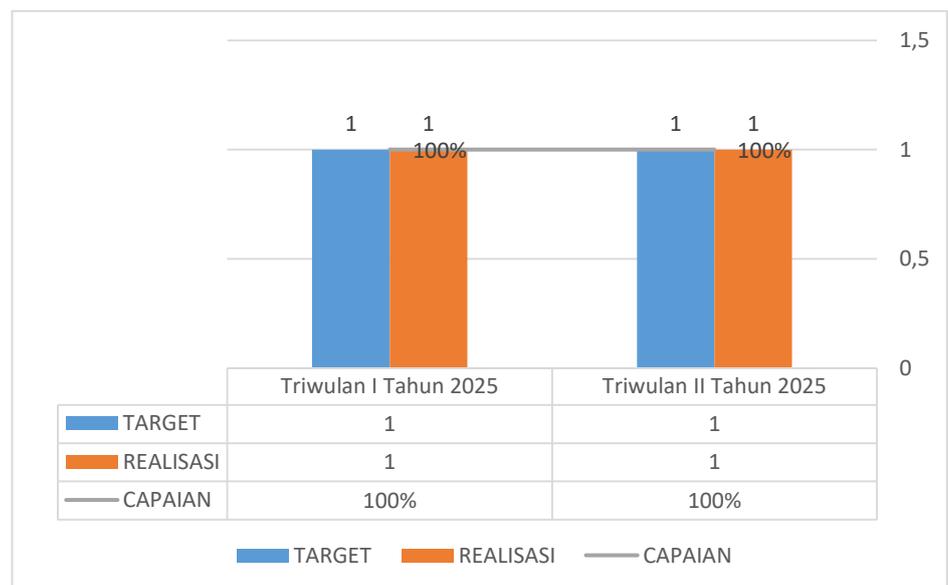
4. IKK 4.4 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam rangka mencapai target-target pembangunan transportasi darat yang telah ditetapkan.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Target kinerja Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat sebanyak 1 kegiatan jika dibandingkan dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II sebanyak 1 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 100%.



a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar Hukum

Berdasarkan PM 6 Tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja Balai pada pasal 9 bahwa Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, serta pengelolaan urusan keuangan, pelaporan Sistem Akuntansi Instansi dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Kronologi Target

Target kegiatan Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat sebanyak 1 kegiatan yang diperoleh dari POK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Perencanaan yang detail dan sesuai dengan kebutuhan serta target yang ingin dicapai akan menjadi dasar yang kuat untuk pelaksanaan anggaran yang efektif;
2. Rencana Penarikan Dana (RPD) harus dikelola secara dinamis dan responsif terhadap perubahan kebutuhan dan kondisi lapangan;
3. Pemantauan dan pelaporan capaian output harus dilakukan secara rutin dan valid untuk memastikan kesesuaian dengan target yang ditetapkan.

Faktor kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap Kegiatan terkait Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena anggaran yang masih terblokir;
2. Perencanaan anggaran yang tidak matang, tidak realistis, atau tidak sesuai dengan kebutuhan dapat menyebabkan berbagai masalah selama pelaksanaan;
3. Ketidaksesuaian antara Perencanaan dan Pelaksanaan Perubahan rencana kegiatan atau kebijakan, atau

ketidakmampuan untuk mengantisipasi perubahan kondisi lapangan,

Realisasi kinerja
Perhitungan realisasi kinerja

Realisasi Kinerja IKK4.4 =

Jumlah Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Hubdat

$$Realisasi\ Kinerja\ IKK4.4 = 1$$

Capaian kinerja

Berdasarkan perhitungan realisasi kinerja, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja terhadap Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat sebanyak 1 kegiatan dari target yang ditetapkan sebanyak 1 kegiatan maka perhitungan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja

$$= \frac{\text{Realisasi Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Hubdat}}{\text{Target Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Hubdat}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{1}{1} \times 100 = 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, dapat diketahui untuk capaian kinerja Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat yakni 100%.

Pagu realisasi capaian keuangan

Adapun anggaran Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 yaitu senilai Rp. 1.885.240.000 realisasi anggaran hingga akhir Juni 2025 sebesar Rp. 449.584.500 atau sebesar 23,85 % dari total anggaran. Anggaran yang digunakan adalah Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat pada bagian pengelolaan bidang ketatausahaan.

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Membuat Perencanaan yang detail dan sesuai dengan kebutuhan serta target yang ingin dicapai;
2. Melakukan koordinasi dengan bagian anggaran terkait urgensi kegiatan yang perlu anggaran pelaksanaan;
3. Melakukan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara rutin.

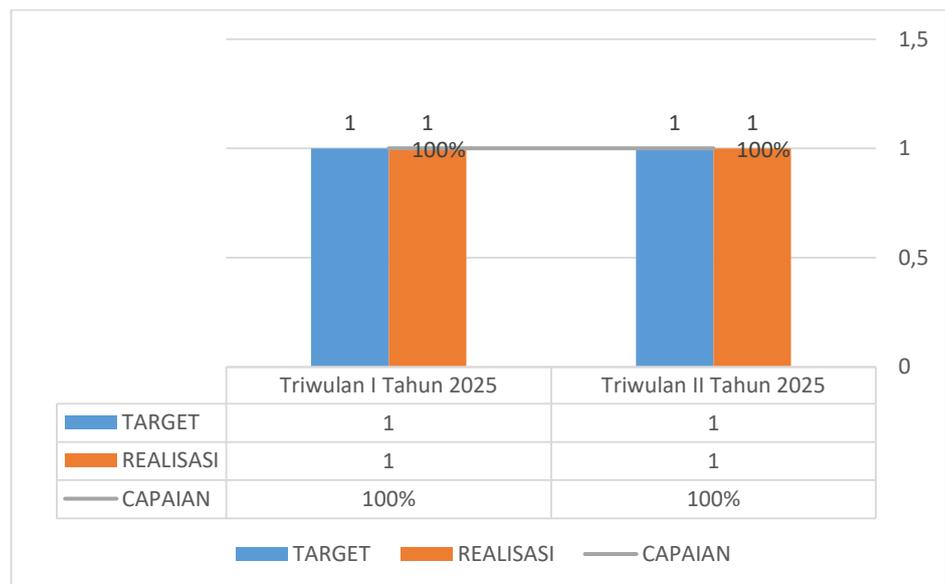
5. IKK 4.5 Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Tingkat lanjut rekomendasi audit adalah tindakan yang diambil oleh entitas yang diaudit untuk menanggapi saran atau rekomendasi yang diberikan oleh auditor dalam laporan hasil pemeriksaan. Ini adalah bagian penting dari proses audit untuk memastikan bahwa temuan dan rekomendasi audit diatasi dan perbaikan yang diperlukan dilakukan.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Target kinerja Kegiatan Tindak lanjut rekomendasi audit/Pemeriksaan sebanyak 1 dokumen jika dibandingkan dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II sebanyak 1 dokumen maka capaian kinerja mencapai 100%.



a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan
Dasar Hukum

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada pasal 20 dikatakan bahwa:

1. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
2. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
3. Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
4. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang .
6. BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

Kronologi Target

Target Kegiatan Tindak lanjut rekomendasi audit/Pemeriksaan sebanyak 1 dokumen yang diperoleh dari POK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Kegiatan Tindak lanjut rekomendasi audit/Pemeriksaan antara lain:

1. Dukungan dan komitmen dari manajemen puncak sangat penting untuk memastikan bahwa rekomendasi audit ditindaklanjuti dengan baik
2. Sistem monitoring dan evaluasi yang baik akan memastikan bahwa tindakan korektif yang diambil berdasarkan rekomendasi audit benar-benar efektif dan memberikan perbaikan yang berkelanjutan
3. Komunikasi yang jelas dan terbuka antara auditor dan auditee akan memastikan bahwa rekomendasi audit dipahami dengan baik dan ditindaklanjuti dengan tepat.

Faktor kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap Kegiatan Tindak lanjut rekomendasi audit/Pemeriksaan antara lain:

1. Kurangnya koordinasi antara berbagai pihak terkait (auditor, auditee, pihak lain yang terlibat) dapat menghambat proses tindak lanjut
2. Temuan audit berulang, ini bisa menjadi indikasi bahwa ada masalah mendasar yang belum teratasi, dan tindak lanjut yang efektif belum dilakukan
3. Kurangnya Komitmen Organisasi Jika tidak ada komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran organisasi untuk menindaklanjuti rekomendasi, maka tindak lanjut akan sulit dilakukan

Realisasi kinerja

Perhitungan realisasi kinerja

Realisasi Kinerja IKK4.5 = Jumlah Tindak lanjut rekomendasi audit/Pemeriksaan

$$\text{Realisasi Kinerja IKK4.5} = 1$$

Capaian kinerja

Berdasarkan perhitungan realisasi kinerja, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja terhadap Kegiatan Tindak lanjut rekomendasi audit/Pemeriksaan sebanyak 1 dokumen dari target yang ditetapkan sebanyak 1 dokumen maka perhitungan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja

$$= \frac{\text{Realisasi dokumen Tindak lanjut rekomendasi audit/Pemeriksaan}}{\text{Target dokumen Tindak lanjut rekomendasi audit/Pemeriksaan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{1}{1} \times 100 = 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, dapat diketahui untuk capaian kinerja Kegiatan Tindak lanjut rekomendasi audit/Pemeriksaan yakni 100%.

Pagu realisasi capaian keuangan

Adapun anggaran Kegiatan Tindak lanjut rekomendasi audit/Pemeriksaan Tahun 2025 yaitu senilai Rp. 1.885.240.000 realisasi anggaran hingga akhir Juni 2025 sebesar Rp. 449.584.500 atau sebesar 23,85 % dari total anggaran. Anggaran yang digunakan adalah Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat pada bagian pengelolaan bidang ketatausahaan.

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait seperti kontraktor dan pejabat sebelumnya yang kegiatannya menjadi temuan pada saat audit/pemeriksaan;
2. Segerah menindak lanjuti temuaan audit/pemeriksaan agar tidak menjadi temuan berulang;
3. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan yang baik untuk kegiatan yang saat ini sedang berjalan agar tidak terdapat kesalahan sehingga tidak menjadi temuan pada saat audit/pemeriksaan.

6. IKK 4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat

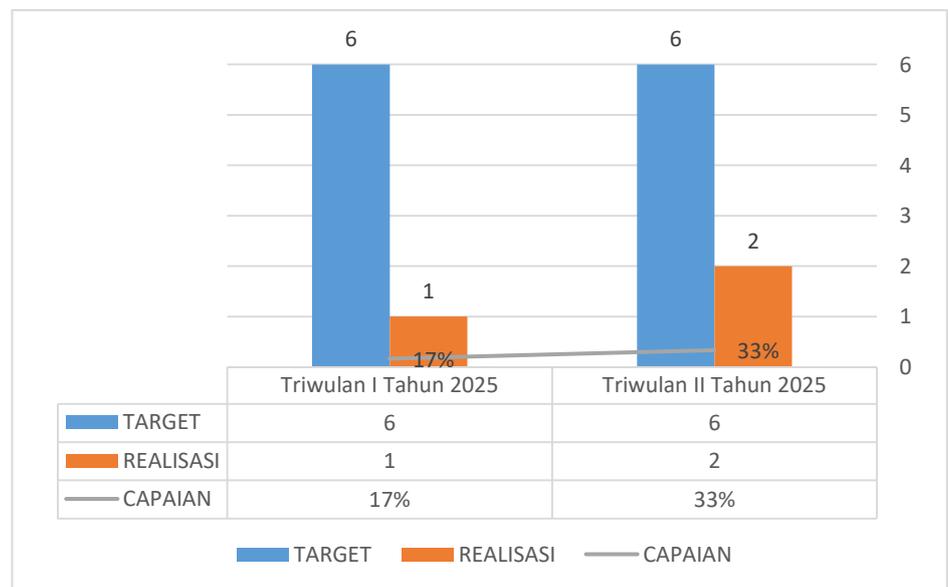
a.1. Definisi Indikator Kinerja

Pengelolaan aset (skor) di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, berfokus pada pengelolaan barang milik negara, termasuk aset bergerak dan tidak bergerak. Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat terdiri atas 2 kegiatan yaitu Kegiatan terkait pengelolaan BMN/Aset dan Kegiatan Penatausahaan BMN. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mencakup serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, hingga penghapusan aset. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset negara dalam menunjang kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya. Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) adalah

rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan BMN.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Target kinerja Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat sebanyak 6 dokumen jika dibandingkan dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II sebanyak 2 dokumen maka capaian kinerja mencapai 100%.



a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dan penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi kegiatan pembukuan, Inventarisasi, dan pelaporan. Tertibnya Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah dapat sekaligus mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang tertib, efektif, dan optimal.

Kronologi Target

Target Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat sebanyak 6 dokumen yang diperoleh dari POK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. SDM yang terlatih dan memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip pengelolaan aset sangat krusial;
2. Pengelompokan aset berdasarkan atributnya memudahkan pengelolaan dan pencarian informasi;
3. Perencanaan yang baik mencakup identifikasi aset, perencanaan kebutuhan, akuisisi, penggunaan, pemeliharaan, dan pembuangan aset.

Faktor kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Pengadaan aset yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dapat menyebabkan pemborosan sumber daya dan aset yang tidak terpakai
2. Kurangnya data yang akurat tentang aset dapat menyulitkan organisasi untuk membuat keputusan yang tepat terkait pengelolaan aset
3. Aset yang tidak dipelihara secara teratur akan mengalami penurunan kualitas dan fungsi lebih cepat, yang dapat menyebabkan kerusakan, gangguan operasional, dan biaya perbaikan yang lebih tinggi

Realisasi kinerja

Perhitungan realisasi kinerja

Realisasi Kinerja IKK4.6 = Jumlah Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat

Realisasi Kinerja IKK4.6 = 2

Capaian kinerja

Berdasarkan perhitungan realisasi kinerja, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja terhadap Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat sebanyak 2 dokumen dari target yang ditetapkan sebanyak 6 dokumen maka perhitungan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja

$$= \frac{\text{Realisasi dokumen Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat}}{\text{Target dokumen Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{2}{6} \times 100 = 33,3\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, dapat diketahui untuk capaian kinerja Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat yakni 33,3%.

Pagu realisasi capaian keuangan

Adapun anggaran Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 yaitu senilai Rp. 1.885.240.000 realisasi anggaran hingga akhir Juni 2025 sebesar Rp. 449.584.500 atau sebesar 23,85 % dari total anggaran. Anggaran yang digunakan adalah Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat pada bagian pengelolaan bidang ketatausahaan.

- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:
1. Melakukan inventarisasi asset secara berkala;
 2. Melengkapi data dukung dokumen pada saat pembangunan atau pengadaan asset sehingga pencatatannya tidak mengalami kesulitan;
 3. Melakukan penata usahaan atau penghapusan untuk asset-aset yang tidak dapat di fungsikan lagi.

7. IKK 4.7 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen

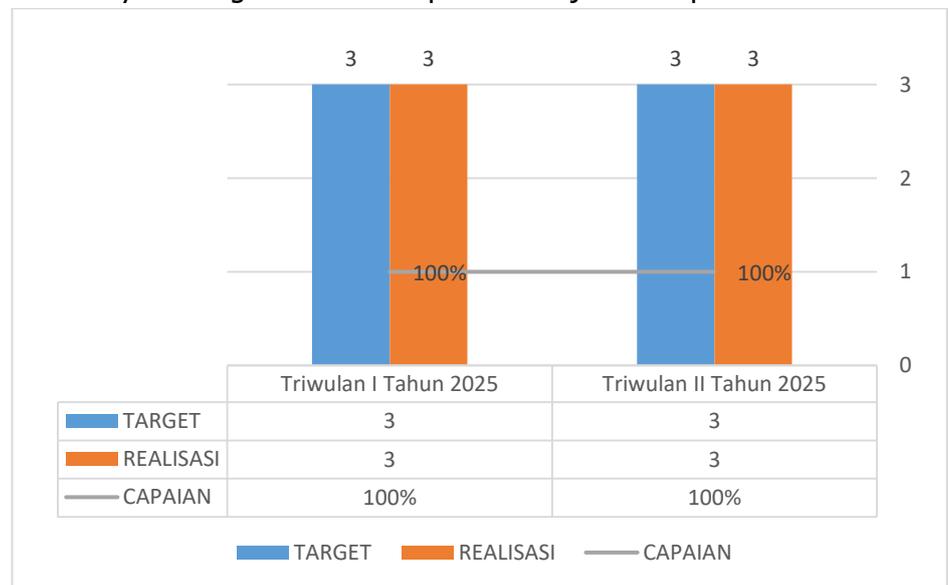
a.1. Definisi Indikator Kinerja

Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen memiliki 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan HUMAS dan Kegiatan PPID. Kegiatan Humas pada Balai Pengelola Transportasi Darat meliputi berbagai upaya untuk membangun citra positif dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat serta

pemangku kepentingan terkait. Beberapa kegiatan utamanya adalah menyampaikan informasi, mengelola reputasi, dan membangun kepercayaan publik terhadap BPTD. Humas BPTD bertugas menginformasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BPTD kepada masyarakat melalui berbagai media seperti website, media sosial, siaran pers, dan publikasi lainnya. Kegiatan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Balai Pengelola Transportasi Darat berfokus pada pengelolaan informasi publik dan pelayanan informasi terkait transportasi darat. Tugas utama PPID BPTD adalah mengelola informasi, menyampaikannya secara efisien, melakukan pemutakhiran digital, dan menyediakan sarana prasarana untuk pelayanan. PPID BPTD bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengelola seluruh informasi yang berkaitan dengan transportasi darat yang menjadi kewenangan BPTD.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Target kinerja Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen sebanyak 3 kegiatan jika dibandingkan dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II sebanyak 3 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 100%.



a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar Hukum

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang

sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Kronologi Target

Target Kegiatan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen sebanyak 3 kegiatan yang diperoleh dari POK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Kegiatan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen antara lain:

1. Penetapan standar pelayanan publik yang jelas dan terukur untuk memastikan informasi yang diberikan efektif, efisien, dan akuntabel;
2. Kemudahan akses informasi bagi seluruh masyarakat, tanpa diskriminasi, baik melalui website, media sosial, maupun layanan tatap muka;
3. Dukungan penuh dari pimpinan instansi sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan Humas dan PPID.

Faktor kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap Kegiatan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen antara lain:

1. Kurangnya perencanaan yang matang. Kegiatan humas yang tidak direncanakan dengan baik cenderung tidak efektif. Perencanaan yang matang meliputi identifikasi target audiens, tujuan yang ingin dicapai, pesan yang akan disampaikan, media yang digunakan, serta anggaran dan waktu pelaksanaan;
2. Kurangnya sumber daya manusia dan anggaran. Kegiatan kehumasan yang efektif membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan anggaran yang memadai. Keterbatasan sumber daya ini dapat menghambat pelaksanaan program-program kehumasan, seperti publikasi, acara, atau kampanye;
3. Kurangnya keterbukaan informasi PPID harus memastikan bahwa informasi publik tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat. Kurangnya keterbukaan informasi dapat menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Realisasi kinerja
Perhitungan realisasi kinerja

Realisasi Kinerja IKK4.7 =

Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen

Realisasi Kinerja IKK4.7 = 3

Capaian kinerja

Berdasarkan perhitungan realisasi kinerja, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja terhadap Kegiatan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen sebanyak 3 Kegiatan perhitungan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{3}{3} \times 100 = 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, dapat diketahui untuk capaian kinerja Kegiatan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen yakni 100%.

Pagu realisasi capaian keuangan

Adapun anggaran Kegiatan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Tahun 2025 yaitu senilai Rp. 1.885.240.000 realisasi anggaran hingga akhir Juni 2025 sebesar Rp. 449.584.500 atau sebesar 23,85 % dari total anggaran. Anggaran yang digunakan adalah Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat pada bagian pengelolaan bidang ketatausahaan.

- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kepuasan pelayanan informasi publik untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan;
2. Membangun komunikasi dua arah antara instansi dengan masyarakat, bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
3. Memberikan pelatihan secara berkala kepada staf PPID untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan informasi publik.

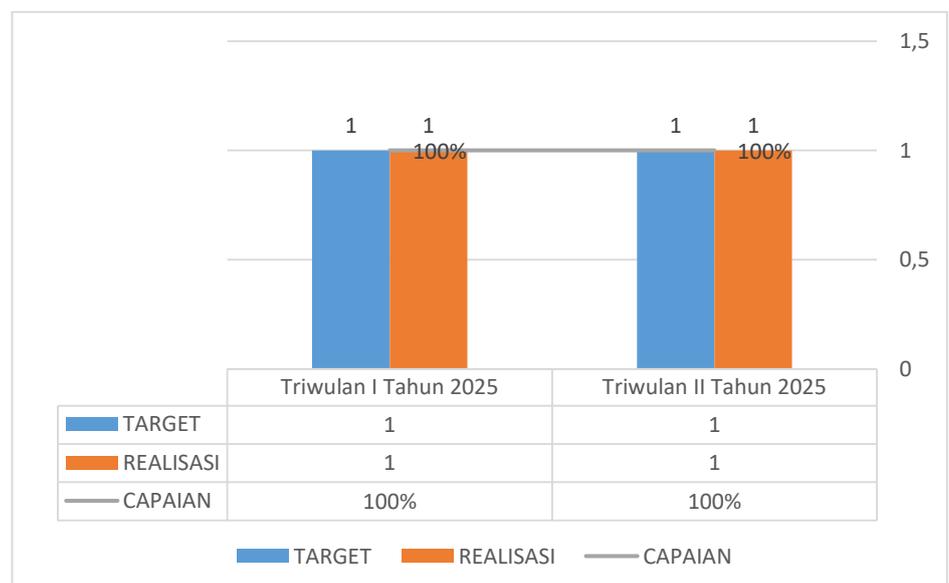
8. IKK 4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Digitalisasi arsip adalah proses mengubah arsip dari format fisik (seperti kertas) menjadi format digital. Tujuan utamanya adalah untuk melestarikan informasi, meningkatkan aksesibilitas, dan mengoptimalkan pengelolaan dokumen. Proses ini melibatkan pemindaian (scanning) dokumen, penyimpanan dalam format digital (misalnya PDF, TIFF), dan pengelolaan dengan sistem kearsipan digital.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Target kinerja kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) sebanyak 1 kegiatan jika dibandingkan dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II sebanyak 1 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 100%.



a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar Hukum

Berdasarkan SE Nomor SE-PHB 4 TAHUN 2024 Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Lingkungan Kementerian Perhubungan. surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman Penerapan Aplikasi SRIKANDI yang digunakan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Surat Edaran ini bertujuan untuk rneningkatkan kualitas dan akuntabilitas kearsipan serta rnenjadi memori kolektif bangsa karena pengelolaan informasi berbasis digital dapat terekam dengan baik serta memudahkan koordinasi antar unit kerja di Kementerian Perhubungan.

Kronologi Target

Target Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) sebanyak 1 kegiatan yang diperoleh dari POK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) antara lain:

1. Ketersediaan teknologi yang memadai seperti perangkat komputar, jaringan internet dan lain-lain;
2. Pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM terkait digitalisasi arsip sangat penting untuk memastikan keberhasilan kegiatan;
3. Perencanaan yang matang Meliputi identifikasi arsip yang akan didigitalkan, tujuan digitalisasi, metode digitalisasi, serta rencana jangka panjang untuk pengelolaan arsip digital.

Faktor kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap Kegiatan kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) antara lain:

1. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan, dapat menjadi penghambat utama;
2. Seringkali, digitalisasi arsip justru menambah kerumitan dalam proses kerja. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang sistem baru, atau penerapan sistem yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi;
3. Potensi serangan siber, peretasan, atau kehilangan data dapat mengancam keberlangsungan arsip digital.

Realisasi kinerja
Perhitungan realisasi kinerja

Realisasi Kinerja IKK4.8 = Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)

Realisasi Kinerja IKK4.8 = 1

Capaian kinerja

Berdasarkan perhitungan realisasi kinerja, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) sebanyak 1 kegiatan dari target yang ditetapkan sebanyak 1 Kegiatan maka perhitungan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{1}{1} \times 100 = 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, dapat diketahui untuk capaian kinerja Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) yakni 100%.

Pagu realisasi capaian keuangan

Adapun anggaran Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) Tahun 2025 yaitu senilai Rp. 3.016.642.000 realisasi anggaran hingga akhir Juni 2025 sebesar Rp. 815.494.374 atau sebesar 27,03 % dari total anggaran. Anggaran yang digunakan adalah Kegiatan layanan perkantoran.

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Memberikan Pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM dalam pengelolaan arsip digital;
2. Buat rencana digitalisasi yang komprehensif, melibatkan semua pihak terkait, dan mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang;

3. Tingkatkan pemahaman dan kesadaran tentang manfaat digitalisasi di seluruh organisasi.

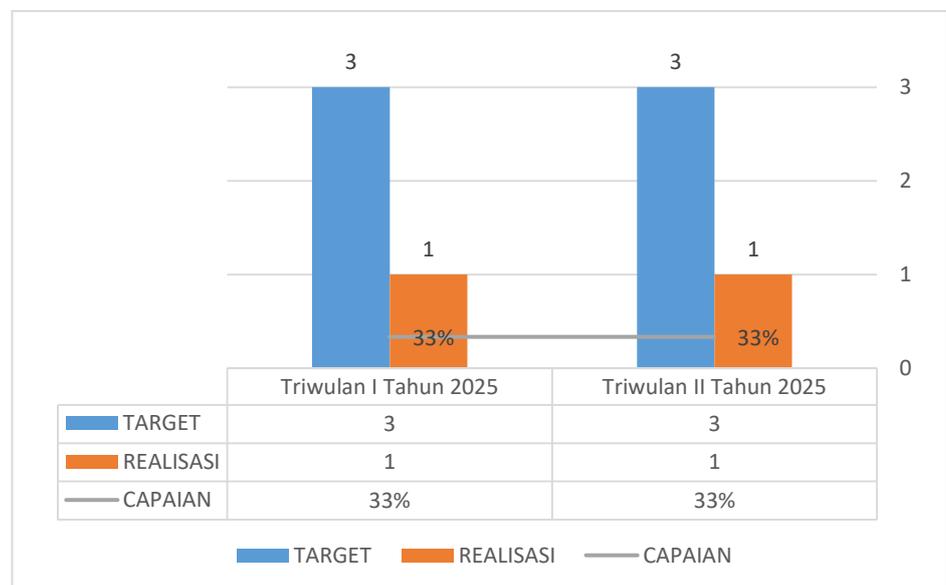
9. IKK 4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) adalah serangkaian proses yang mengatur pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan hingga serah terima, untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Pengelolaan ini melibatkan berbagai kegiatan seperti perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, pengawasan, dan penyerahan hasil pengadaan.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Target kinerja Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 3 kegiatan jika dibandingkan dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II sebanyak 1 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 33,3%.



a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh

APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Kronologi Target

Target kinerja Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 3 kegiatan yang diperoleh dari POK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa antara lain:

1. Kebutuhan barang dan jasa teridentifikasi dengan baik, spesifik, dan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi;
2. Penyedia memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pengadaan, termasuk rekam jejak yang baik;
3. Penggunaan system pengawasan yang efektif akan memastikan proses pengadaan berjalan sesuai aturan dan prinsip-prinsip yang berlaku.

Faktor kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa antara lain:

1. Kesalahan dalam memahami atau mengikuti aturan teknis atau administrasi dapat menyebabkan kegagalan tender atau pengulangan proses pengadaan;
2. Anggaran yang tidak mencukupi atau tidak dialokasikan dengan tepat dapat menghambat proses pengadaan dan mengakibatkan penundaan atau pengurangan kualitas barang/jasa;
3. Kurangnya koordinasi antara berbagai pihak terkait, seperti pengguna anggaran, pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa, dapat menyebabkan ketidaksesuaian, keterlambatan, dan bahkan kegagalan pengadaan.

Realisasi kinerja

Perhitungan realisasi kinerja

Realisasi Kinerja IKK4.9 =

Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi Kinerja IKK4.9 = 1

Capaian kinerja

Berdasarkan perhitungan realisasi kinerja, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 1 kegiatan dari target yang ditetapkan sebanyak 3 Kegiatan maka perhitungan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{1}{3} \times 100 = 33,3\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, dapat diketahui untuk capaian kinerja Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yakni 100%.

Pagu realisasi capaian keuangan

Adapun anggaran Kegiatan Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 yaitu senilai Rp. 272.720.000,- belum terdapat realisasi anggaran hingga akhir Juni 2025 karna anggaran masih terblokir.

- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:
1. Melakukan monitoring dan inventarisasi kebutuhan sebelum melakukan pengusulan pengadaan barang dan jasa;
 2. Melakukan koordinasi dengan bagian anggaran terkait pembukaan blokir anggaran agar kegiatan dapat terlaksana;
 3. Meningkatkan kompetensi SDM dibidang pengelolaan barang dan jasa.

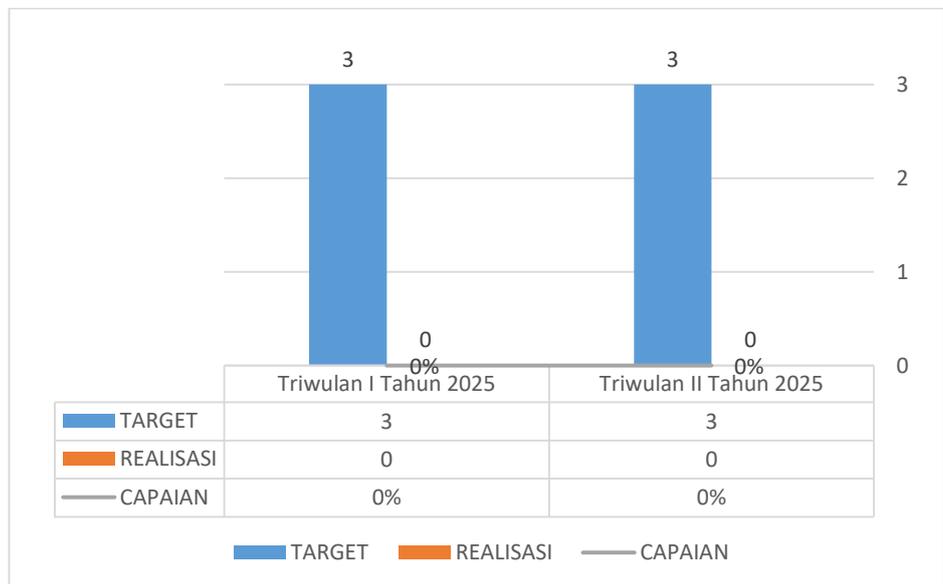
10. IKK 4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Kegiatan Pengembangan sumber daya manusia (SDM) unit kerja mencakup berbagai kegiatan untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan karyawan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa unit kerja memiliki tenaga kerja yang berkualitas dan mampu berkontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan Pengembangan sumber daya manusia (SDM) unit kerja dapat berupa Memberikan pelatihan yang berfokus pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan spesifik yang dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu, seperti pelatihan penggunaan aplikasi, pelatihan bahasa asing, atau pelatihan teknis lainnya. Mengembangkan keterampilan non-teknis seperti komunikasi, kepemimpinan, kerjasama tim, manajemen waktu, dan pemecahan masalah.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Target kinerja Kegiatan Pengembangan sumber daya manusia (SDM) unit kerja sebanyak 3 kegiatan jika dibandingkan dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II sebanyak 0 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 0%.



a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 37 Tahun 2020 bahwa Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Analis SDM Aparatur diikutsertakan pada pelatihan. Pelatihan yang diberikan

disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja. Pelatihan yang diberikan kepada Analis SDM Aparatur dalam bentuk pelatihan fungsional dan pelatihan teknis di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur. Selain pelatihan Analis SDM Aparatur dapat mengembangkan kompetensinya melalui kompetensi lainnya seperti seminar, lokakarya, konferensi, dan studi banding.

Kronologi Target

Target kinerja Kegiatan Pengembangan sumber daya manusia (SDM) unit kerja sebanyak 3 kegiatan yang diperoleh dari POK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Kegiatan Pengembangan sumber daya manusia (SDM) unit kerja antara lain:

1. Program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan akan meningkatkan kompetensi dan keterampilan karyawan, sehingga mereka dapat berkontribusi lebih efektif;
2. Komunikasi yang efektif dan terbuka akan memastikan bahwa semua anggota unit kerja memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, tugas, dan harapan;
3. Memperhatikan kesejahteraan karyawan, seperti kesehatan fisik dan mental, akan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif.

Faktor kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap Kegiatan Pengembangan sumber daya manusia (SDM) unit kerja antara lain:

1. Keterbatasan anggaran dapat menghambat pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan SDM. Ini bisa termasuk kurangnya dana untuk pelatihan, biaya operasional, atau fasilitas yang dibutuhkan
2. Tingkat pendidikan, keterampilan, dan pengetahuan karyawan yang tidak memadai dapat menjadi penghambat dalam proses pengembangan. Jika karyawan tidak memiliki dasar yang cukup, program pelatihan mungkin tidak akan efektif.
3. Strategi pengembangan SDM yang tidak jelas atau tidak terencana dengan baik dapat menyebabkan program menjadi tidak efektif

Realisasi kinerja
Perhitungan realisasi kinerja

Realisasi Kinerja IKK4.10

= Kegiatan Pengembangan sumber daya manusia (SDM) unit kerja

$$\text{Realisasi Kinerja IKK4.10} = 0$$

Capaian kinerja

Berdasarkan perhitungan realisasi kinerja, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Kegiatan Pengembangan sumber daya manusia (SDM) unit kerja sebanyak 0 kegiatan dari target yang ditetapkan sebanyak 3 Kegiatan maka perhitungan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{0}{3} \times 100 = 0\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, dapat diketahui untuk capaian kinerja Kegiatan Pengembangan sumber daya manusia (SDM) unit kerja yakni 0%.

Pagu realisasi capaian keuangan

Adapun anggaran Kegiatan Pengembangan sumber daya manusia (SDM) unit kerja Tahun 2025 yaitu senilai Rp. 675.000.000,- belum terdapat realisasi anggaran hingga akhir Juni 2025 karna anggaran masih terblokir.

- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Memberikan Program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan agar meningkatkan kompetensi dan keterampilan karyawan;
2. Melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja secara rutin;
3. Melibatkan karyawan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan SDM.

II.3. Alokasi Anggaran Tahun 2025

III.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2025

1. Pagu Anggaran

a. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2025

Pagu Awal DIPA TA. 2025 sebesar Rp.92.243.346.000,- dengan rincian per Sumber Dana sebagai berikut:

Tabel II. 3 Rincian Pagu Awal per Sumber Dana

RM	Rp.	74.600.506.000	80,87%
PNBP	Rp.	17.642.840.000	19,13%
SBSN	Rp.	-	0%
Total	Rp.	92.243.346.000	100,00%

Tabel III.16 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2025

Belanja Pegawai	Rp.	-	-
Belanja Barang	Rp.	79.720.664.000	86,42%
Belanja Modal	Rp.	12.522.682.000	13,58%
Total	Rp.	92.243.346.000	100,00%

Hingga saat ini belum ada perubahan nilai Pagu pada DIPA BPTD Kelas II Papua Barat namun sekitas 50% anggaran masih diblokir karena kebijakan efisiensi anggaran.

Tabel II. 4 Rincian Pagu per Sumber Dana Triwulan II

RM	Rp.	74.600.506.000	80,87%
PNBP	Rp.	17.642.840.000	19,13%
SBSN	Rp.	-	0%
Total	Rp.	92.243.346.000	100,00%

b. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2025

Pagu DIPA TA. 2025 sebesar **Rp. 92.243.346.000,-** dengan rincian per Jenis Belanja sebagai berikut:

Tabel II. 7 Rincian Pagu per Jenis Belanja

Belanja Pegawai	Rp.	-	-
Belanja Barang	Rp.	79.720.664.000	86,42%
Belanja Modal	Rp.	12.522.682.000	13,58%
Total	Rp.	92.243.346.000	100,00%

c. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

Pengurangan dan pergeseran anggaran tersebut sesuai surat pengesahan Revisi Anggaran sebagai Berikut :

- 1) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA-022.03.2.403867/2025 Tanggal 02 Desember 2024 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat TA. 2025 (DIPA Awal);
- 2) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA-022.03.2.403867/2025 Tanggal 15 Januari 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat TA. 2025 (Revisi ke-1);
- 3) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA-022.03.2.403867/2025 Tanggal 22 Januari 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat TA. 2025 (Revisi ke-2);
- 4) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA-022.03.2.403867/2025 Tanggal 8 Februari 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat TA. 2025 (Revisi ke-3);
- 5) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA-022.03.2.403867/2025 Tanggal 22 Februari 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat TA. 2025 (Revisi ke-4);
- 6) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA-022.03.2.403867/2025 Tanggal 24 Maret 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat TA. 2025 (Revisi ke-5).
- 7) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA-022.03.2.403867/2025 Tanggal 11 April 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat TA. 2025 (Revisi ke-6).

- 8) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA-022.03.2.403867/2025 Tanggal 2 Juli 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat TA. 2025 (Revisi ke-7).
- 9) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA-022.03.2.403867/2025 Tanggal 4 Juli 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat TA. 2025 (Revisi ke-8)

2. Refocusing Anggaran Tahun 2025

a. Rincian Revisi per Sumber Dana Tahun 2025

Sampai pada Triwulan II Tahun Anggaran 2025 DIPA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat mengalami beberapa kali revisi POK namun belum ada perubahan pada nilai Pagu. Berikut adalah rincian revisi anggaran per sumber dana.

Tabel II. 5 Rincian Revisi Anggaran Tahun 2025 per Sumber Dana

	SUMBER DANA			JUMLAH
	RM	PNBP	SBSN	
PAGU AWAL	74.600.506.000	17.642.840.000	-	92.243.346.000
REVISI KE-1	74.600.506.000	17.642.840.000	-	92.243.346.000
REVISI KE-2	74.600.506.000	17.642.840.000	-	92.243.346.000
REVISI KE-3	74.600.506.000	17.642.840.000	-	92.243.346.000
REVISI KE-4	74.600.506.000	17.642.840.000	-	92.243.346.000
REVISI KE-5	74.600.506.000	17.642.840.000	-	92.243.346.000
REVISI KE-6	74.600.506.000	17.642.840.000	-	92.243.346.000
REVISI KE-7	74.600.506.000	17.642.840.000	-	92.243.346.000
REVISI KE-8	74.600.506.000	17.642.840.000	-	92.243.346.000

b. Rincian Realokasi Per Jenis Belanja Tahun 2025

Adapun rincian realokasi anggaran per jenis belanja dijelaskan pada tabel di bawah ini. Sampai dengan Triwulan II belum terdapat perubahan nominal per sumber dana dan per jenis belanja TA 2025.

Tabel II. 6 Rincian Revisi Anggaran Tahun 2025 Per Jenis Belanja

	JENIS BELANJA			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
PAGU AWAL	-	79.720.664.000	12.522.682.000	92.243.346.000
REVISI KE-1	-	79.720.664.000	12.522.682.000	92.243.346.000
REVISI KE-2	-	79.720.664.000	12.522.682.000	92.243.346.000

	JENIS BELANJA			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
REVISI KE-3	-	79.720.664.000	12.522.682.000	92.243.346.000
REVISI KE-4	-	79.720.664.000	12.522.682.000	92.243.346.000
REVISI KE-5	-	79.720.664.000	12.522.682.000	92.243.346.000
REVISI KE-6	-	79.720.664.000	12.522.682.000	92.243.346.000
REVISI KE-7	-	79.720.664.000	12.522.682.000	92.243.346.000
REVISI KE-8	-	79.720.664.000	12.522.682.000	92.243.346.000

c. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja TA 2025

Adapun rincian realokasi anggaran per sumber dan dan per jenis belanja pada Triwulan II Tahun 2025 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

ALOKASI	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN II
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang	79.720.664.000	-	79.720.664.000
· RM	62.077.824.000	-	62.077.824.000
· PNBPN	17.642.840.000	-	17.642.840.000
Belanja Modal	12.522.682.000		12.522.682.000
· RM	12.522.682.000	-	12.522.682.000
· PNBPN	-	-	-
· SBSN	-	-	-
TOTAL	92.243.346.000	-	92.243.346.000

d. Rincian Realokasi Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan TA 2025

Adapun rincian realokasi anggaran per sumber dan dan per jenis belanja dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel II. 7 Rincian Realokasi per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan T.A 2025

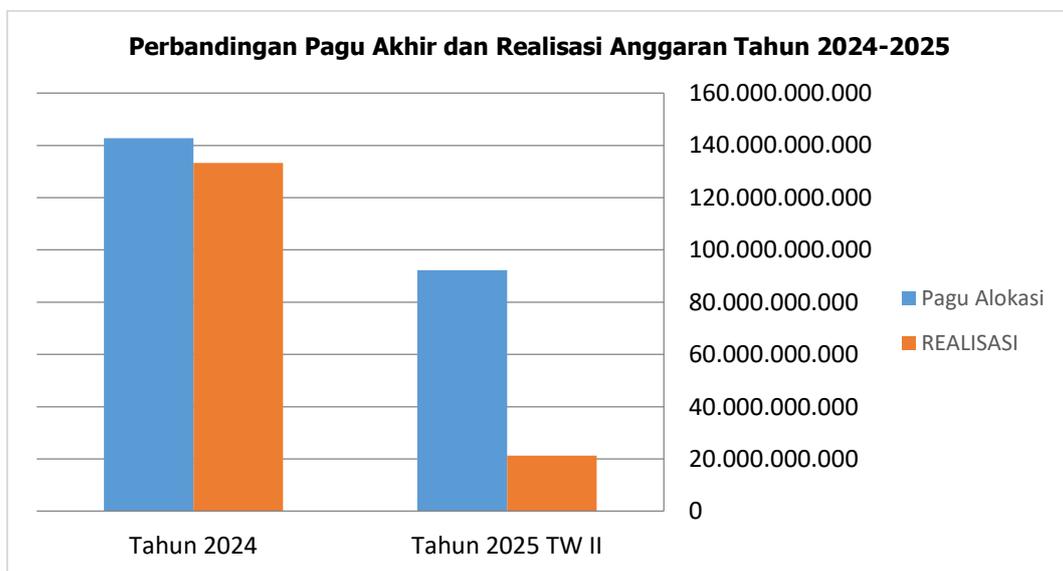
KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	TRIWULAN I		PAGU PER TRIWULAN II	TRIWULAN II	
				REALIASI	%		REALIASI	%
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	81.381.240.000	81.381.240.000	4.242.427.524	5,21%	81.381.240.000	16.822.507.047	20,67%
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	60.113.993.000	60.113.993.000	2.073.883.649	3,45%	60.113.993.000	12.548.269.903	20,87%
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	17.352.602.000	17.352.602.000	1.800.162.875	10,37%	17.352.602.000	3.604.730.644	20,77%
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	3.914.645.000	3.914.645.000	368.081.000	9,40%	3.914.645.000	669.506.500	17,10%
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	10.862.106.000	10.862.106.000	2.636.255.035	24,27%	10.862.106.000	4.440.254.816	40,88%
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	10.862.106.000	10.862.106.000	2.636.255.035	24,27%	10.862.106.000	4.440.254.816	40,88%

3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2024-2025

Adapun data perbandingan pagu dan realisasi dari Tahun 2024 – 2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 8 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 – Tahun 2025

No	Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	
		Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2024	154.542.192.000	142.807.241.000	133.249.015.645	93,31
2	2025 TW II	92.243.346.000	92.243.346.000	21.262.761.863	23,05



Berdasarkan data di atas dapat diketahui nilai pagu awal, pagu akhir, dan realisasi setiap tahunnya, sehingga di ketahui masing-masing dana yang terserap setiap tahunnya. Seperti pada tahun **2024** anggaran yang terserap sebesar Rp. 133.249.015.645,- atau mencapai 93,31% dari pagu akhir sebesar Rp. 142.807.241.000,-. Pada Tahun **2025** anggaran yang terserap hingga TW II sebesar Rp. 21.262.761.863,- atau mencapai 23,05 % dari pagu akhir sebesar Rp. 92.243.346.000,-.

II.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2025

Adapun data realisasi anggaran per sasaran kegiatan dan kegiatan pada Triwulan II Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 9 Realisasi Anggaran per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	TRIWULAN I		PAGU PER TRIWULAN II	TRIWULAN II	
				REALIASI	%		REALIASI	%
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	81.381.240.000	81.381.240.000	4.242.427.524	5,21%	81.381.240.000	16.822.507.047	20,67%
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	60.113.993.000	60.113.993.000	2.073.883.649	3,45%	60.113.993.000	12.548.269.903	20,87%
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	17.352.602.000	17.352.602.000	1.800.162.875	10,37%	17.352.602.000	3.604.730.644	20,77%
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	3.914.645.000	3.914.645.000	368.081.000	9,40%	3.914.645.000	669.506.500	17,10%
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	10.862.106.000	10.862.106.000	2.636.255.035	24,27%	10.862.106.000	4.440.254.816	40,88%
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	10.862.106.000	10.862.106.000	2.636.255.035	24,27%	10.862.106.000	4.440.254.816	40,88%

2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada Triwulan II Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 10 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU PER TRIWULAN I	REALISASI TRIWULAN I		PAGU PER TRIWULAN II	REALISASI TRIWULAN II	
			Rp	%		Rp	%
1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Barang	79.720.664.000	6.851.536.559	8,59	79.720.664.000	20.900.962.044	26,22
3	Belanja Modal	12.522.682.000	26.846.000	0,21	12.522.682.000	361.799.819	2,89
Total		92.243.346.000	6.878.382.559	7,46	92.243.346.000	21.262.761.863	23,05

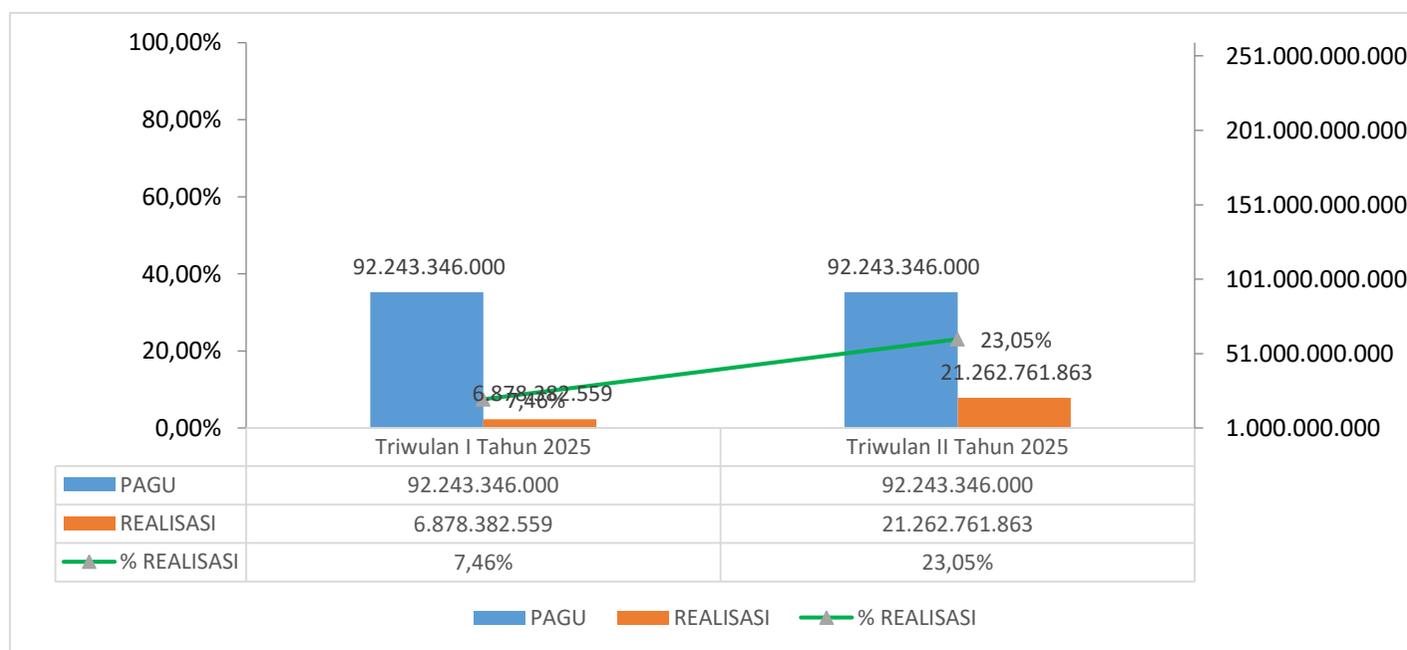
Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per jenis belanja pada Triwulan II Tahun 2025 untuk belanja barang sebesar Rp. 20.900.962.044 atau sebesar 26,22 % dari total pagu Rp. 79.720.664.000 dan untuk belanja modal realisasi sebesar Rp. 361.799.819 atau sebesar 2,89 % dari total pagu Rp. 12.522.682.000.

3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada Tahun Anggaran 2025 yang sudah di analisis per Triwulan II untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 11 Realisasi Anggaran per Sumber Dana Tahun 2025

NO	SUMBER DANA	PAGU ALOKASI TW I	REALISASI TW I		PAGU ALOKASI TW II	REALISASI TW II	
			Rp	%		Rp	%
1	Rupiah Murni	74.600.506.000	6.878.382.559	9,22	74.600.506.000	21.262.761.863	28,50
2	PNBP	17.642.840.000	-	-	17.642.840.000	-	-
3	SBSN	-	-	-	-	-	-
TOTAL		92.243.346.000	6.878.382.559	7,46	92.243.346.000	21.262.761.863	23,05



4. Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

Berikut merupakan data dari dana yang tidak terserap oleh unit kerja berdasarkan per jenis belanja, per sumber dana, dan sisa anggaran pada Tahun 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 12 Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Belanja Pegawai	-	-	-
2	Belanja Barang	79.720.664.000	6.851.536.559	72.869.127.441
3	Belanja Modal	12.522.682.000	26.846.000	12.495.836.000
TOTAL		92.243.346.000	6.878.382.559	85.364.963.441

Tabel II. 13 Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Rupiah Murni	74.600.506.000	6.878.382.559	67.722.123.441
2	PNBP	17.642.840.000	-	17.642.840.000
3	SBSN			
TOTAL		92.243.346.000	6.878.382.559	85.364.963.441

Tabel II. 16 Rincian Kegiatan Terblokir Tahun 2025

NO	KEGIATAN	SISA PAGU
1	Program Infrastruktur Konektivitas	45.573.494.400
2	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	33.663.836.080
3	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	9.717.457.120
4	Penunjang Teknis Transportasi Darat	2.192.201.200
5	Program Dukungan Manajemen	6.082.779.360
6	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	6.082.779.360
TOTAL		51.656.273.760

II.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan sasaran program per Triwulan II Tahun 2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II. 14 Rincian Efisiensi Anggaran

No	SASARAN PROGRAM	TRIWULAN I			TRIWULAN II		
		% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan I)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan I)
1	SK2 Meningkatkan konektivitas jaringan transportasi DTPK	100	32,77	67,23	100	32,77	67,23
2	SK5 Meningkatkan rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	50	32,74	17,26	50	32,74	17,26
3	SK8 Meningkatkan Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP	50	18,65	31,35	50	18,65	31,35
4	SK9 Meningkatkan Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	8,32	24,75	-16,43	28,75	24,75	4
5	SK10 Meningkatkan kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	0	0	0	0	0	0
6	SK11 Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	94,2	65	29,2	94,2	65	29,2
7	SK12 Meningkatkan kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	0	0	0	0	0	0
8	SK4 Meningkatkan Layanan Manajemen SDM Internal	50	19,4	30,6	68,36	19,4	48,96
Rata-rata		44,07%	24,16%	19,90%	48,91	24,16	24,75

2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat, membutuhkan SDM yang mencukupi sehingga dapat menunjang optimalisasi pelayanan transportasi darat di kantor induk maupun di kantor satuan pelayanan.

Tabel II. 17 Perbandingan Jumlah Kebutuhan dan jumlah eksisting SDM

No	Jumlah kebutuhan SDM	Realisasi SDM	Capaian SDM	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	315	154	50,15%	30,796	33,67%	146,63%

Berdasarkan data diatas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata target kinerja sebesar 30,796, dengan realisasi kinerja sebesar 33,67% menunjukkan capaian SDM sebesar 50,15% dengan realisasi sebanyak 158 dari jumlah kebutuhan SDM sebesar 315, Dimana realisasi tersebut terdiri dari 68 orang PNS, 38 Orang PPPK dan 38 tenaga Outsorsing.

II.3.4 Hambatan dan Kendala

Beberapa Hambatan/Kendala masih dalam realisasi daya serap anggaran antara lain:

1. Anggaran untuk beberapa kegiatan masih di blokir sehingga kegiatan belum bias dilaksanakan;
2. Kegiatan kontraktual seperti Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan mungkin tidak dapat dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran.
3. Masih kurangnya pemenuhan dalam Sumber Daya Manusia yang mana tugas dan fungsinya di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat.
4. System perencanaan yang masih kurang matang mengenai pemahaman kebutuhan anggaran sehingga masih banyak melakukan revisi anggaran.
5. Dalam kegiatan pembangunan, faktor cuaca/faktor alam yang tidak menentu menjadi salah satu kendala dalam proses pelaksanaannya.



BAB III

PENUTUP

BAB III

PENUTUP

III.1 Penutup

III.1.1 Ringkasan Capaian

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sebagai penutup Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dapat disampaikan bahwa dari 23 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat pada Triwulan II Tahun 2025 terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang lebih besar atau sama dengan 100% ($0\% \leq \text{IKK} < 100\%$) dan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang kurang dari 100% ($0\% \leq \text{IK} < 100\%$). Adapun rincian untuk setiap IKK pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan terealisasi sebanyak 23 Trayek (target 23 Trayek) tercapai 100%;
2. Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas terealisasi sebanyak 0 unit (target 1 Unit) tercapai 0%;
3. Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP terealisasi sebanyak 5 Trayek (target 5 Trayek) tercapai 100%;
4. Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM terealisasi sebanyak 0 unit (target 2 Unit) tercapai 0%;
5. Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM terealisasi sebanyak 7 Lokasi (target 7 Lokasi) tercapai 100%;
6. Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang terealisasi sebanyak 3 kegiatan (target 3 kegiatan) tercapai 50%;
7. Pengawasan Evaluasi MRL dan Andalalin terealisasi sebanyak 2 kegiatan (target 6 kegiatan) tercapai 40%;
8. Pengawasan Evaluasi Perlengkapan Jalan terealisasi sebanyak 1 kegiatan (target 2 kegiatan) tercapai 50%;
9. Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan terealisasi sebanyak 0 kegiatan (target 1 kegiatan) tercapai 0%;
10. Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah terealisasi sebanyak 0 kegiatan (target 6 kegiatan) tercapai 0%;

11. Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis terealisasi sebanyak 3.385 Unit (target 3.593 unit) tercapai 94,2%;
12. Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda terealisasi sebanyak 0 Orang (target 400 Orang) tercapai 0%;
13. Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda terealisasi sebanyak 0 Orang (target 100 Orang) tercapai 0%;
14. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebanyak 2 kegiatan (target 3 kegiatan) tercapai 67%;
15. Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebanyak 1 dokumen (target 1 dokumen) tercapai 100%;
16. Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan terealisasi sebanyak 1 kegiatan (target 2 kegiatan) tercapai 50%;
17. Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebanyak 1 kegiatan (target 1 kegiatan) tercapai 100%;
18. Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan terealisasi sebanyak 1 dokumen (target 1 dokumen) tercapai 100%;
19. Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebanyak 2 dokumen (target 6 dokumen) tercapai 33,3%;
20. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebanyak 3 kegiatan (target 3 kegiatan) tercapai 100%;
21. Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) terealisasi sebanyak 1 kegiatan (target 1 kegiatan) tercapai 100%;
22. Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa terealisasi sebanyak 3 kegiatan (target 3 kegiatan) tercapai 100%;
23. Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja terealisasi sebanyak 0 kegiatan (target 3 kegiatan) tercapai 0%;

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan dan keamanan transportasi darat dan penyeberangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju zero accident.

III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Berdasarkan hasil evaluasi diperlukan rekomendasi dalam upaya perbaikan disertai unit kerja yang bertanggung jawab dalam melakukan rekomendasi yang disusun. Berikut hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab :

Tabel III. 1 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN II			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
1.	SK2 Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK2.1 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan	Trayek	23	23	23	100%	Tercapai	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan Koordiansi dengan pihak GM Damri cabang agar target tahun-tahun berikutnya dapat tercapai dengan baik. Mengoptimalkan revisi anggaran terkait angkutan perintis jalan agar alokasi anggaran setiap cabang Damri sesuai dengan kebutuhan 	<ol style="list-style-type: none"> Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
2.	SK5 Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK5 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	1	1	0	0	Tidak Tercapai	melakukan koordinasi bagian anggaran terkait kemungkinan pembukaan blokir anggaran	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
		IKK6 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Trayek	5	5	5	100%	Tercapai	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan koordinasi dengan pihak ASDP dan pihak lainnya agar kegiatan dapat berjalan dengan baik; Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai anggaran yang tersedia mengingat saat ini anggaran mengalami efisiensi. 	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN II			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
3.	SK8 Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK8.1 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	2	2	0	0%	Tidak Tercapai	melakukan persiapan kegiatan seperti inventaris gedung terminal bagian mana saja yang akan dilakukan	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
		IKK8.2 Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Lokasi	7	7	7	100%	Tercapai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah dan mempertahankan tenaga kerja yang terampil 2. Mengoptimalkan pelayanan dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia. 3. terus meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait baik di instansi pusat maupun di tingkat daerah 	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
4.	SK9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK9.2 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang	Kegiatan	6	6	3	50%	Tidak Tercapai	selanjutnya akan dilakukan penindakan pada kendaraan odol di provinsi papua Barat Daya pada Bulan Agustus 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 2. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN II			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
		IKK9.5 Pengawasan Evaluasi MRL dan Andalalin	Kegiatan	5	5	2	40%	Tidak Tercapai	selalu melakukan koordinasi dan bemantauan secara langsung agar dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK9.6 Pengawasan Evaluasi Perlengkapan Jalan	Kegiatan	4	4	1	25%	Tidak Tercapai	melakukan pengawasan terhadap Faskes yang telah terpasang	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK9.7 Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	1	1	0	0%	Tidak tercapai	Melakukan persiapan pengawasan pemeliharaan dan berkoordinasi dengan pihak pelaksana atau kontraktor	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
5.	SK10 Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK10.2 Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah	Kegiatan	6	6	0	0%	Tidak Tercapai	Melakukan sosialisasi mengenai peraturan kalibrasi dan akreditasi agar beberapa kabupaten yang belum memiliki alat uji terdorong untuk melakukan pengadaan alat uji.	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
6.	SK11 Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK11.1 Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis	Unit	3.593	3.593	3.385	94,2%	Tidak tercapai	saat ini untuk pengadaan paku jalan masih dalam tahap pemeliharaan hasil pekerjaan sedangkan kegiatan pengadaan dan pemasangan guadrail masih dan sedang berjalan.	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
7	SK12 Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan	IKK12.1 Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang	Orang	400	400	0	0%	Tidak tercapai	melakukan koordinasi kebagian anggaran terkait kemungkinan pembukaan	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN II			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
	berkeselamatan	berbeda							blokir anggaran	Penyeberangan
		IKK12.2 Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	100	100	0	0%	Tidak tercapai	melakukan koordinasi kebagian anggaran terkait kemungkinan pembukaan blokir anggaran	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
8.	SK4 Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal	IKK4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	3	2	67%	Tidak tercapai	melakukan koordinasi yang baik dengan pihak internal BPTD Kelas II Papua Barat maupun pemerintah pusa	Sub Bagian Tata Usaha
		IKK4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1	1	1	100%	Tercapai	saat ini sedang dilaksanakan persiapan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal	Sub Bagian Tata Usaha
		IKK4.3 Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan	Kegiatan	2	2	1	50%	Tidak tercapai	saat ini sedang dilakukan pemeriksaan lembar kerja evaluasi oleh Inspektorat Jenderal	Sub Bagian Tata Usaha
		IKK4.4 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1	1	1	100%	Tercapai	saat ini tingkat penyerapan anggaran masih rendah karena terdapat anggaran yang di blokir sehingga	Sub Bagian Tata Usaha
		IKK4.5 Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1	1	1	100%	Tercapai	telah dibuat surat tindak lanjut atas temuan itjen	Sub Bagian Tata Usaha
		IKK4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	6	6	2	33,3%	Tidak tercapai	melakukan penatausahaan Aset BMN yang belum tercatat dengan	Sub Bagian Tata Usaha

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN II			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
								baik		
		IKK4.7 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	3	3	100%	Tercapai	saat ini selalu dilakukan sosialisasi terkait keselamatan baik melalui media online maupun media cetak	Sub Bagian Tata Usaha
		IKK4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	1	1	1	100%	Tercapai	melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan perkantoran namun tetap menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Sub Bagian Tata Usaha
		IKK4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	3	3	1	33,3%	Tidak tercapai	melakukan koordinasi kebagian anggaran terkait kemungkinan pembukaan blokir anggaran	Sub Bagian Tata Usaha
		IKK4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	3	3	0	0%	Tidak tercapai	melakukan koordinasi kebagian anggaran terkait kemungkinan pembukaan blokir anggaran	Sub Bagian Tata Usaha



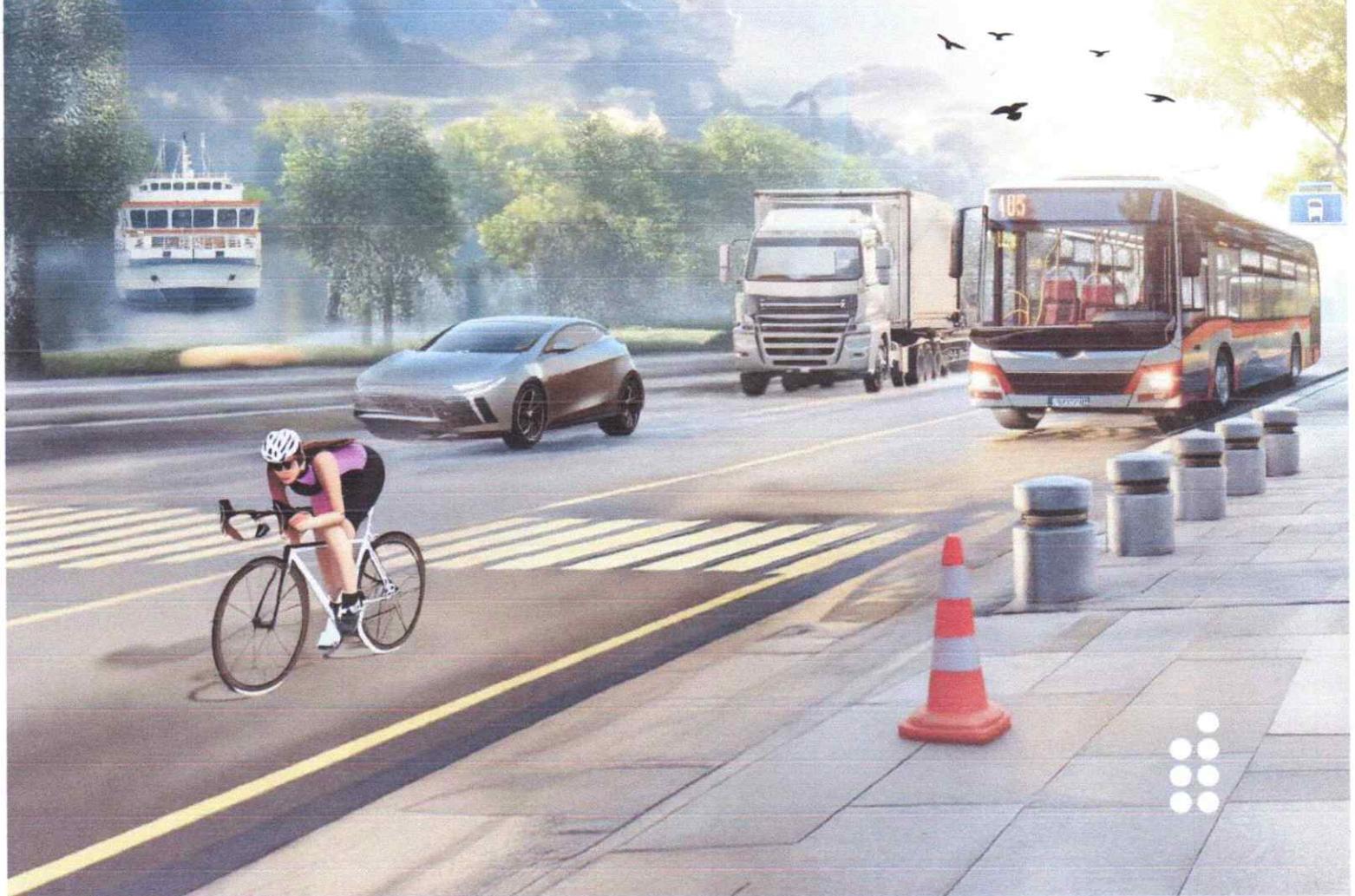
LAMPIRAN



RENCANA KINERJA TAHUNAN

20 25

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat



RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II PAPUA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1.	SK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7
2.	SK2 Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
3.	SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	500
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
4.	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

Sorong, 14 Desember 2024

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Papua Barat



Edy Purwanto
NIP. 19841217 200912 1 002



Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Papua Barat**

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Masnah, S.Pd.I.	Pengelola Keuangan	8-1-2025	yh.
2.	Diperiksa	Raditya Firmansyah Darmawan, S.S.T (TD)., M.T.	Kepala Subbagian Tata Usaha	8-1-2025	g
3.	Disetujui	Raditya Firmansyah Darmawan, S.S.T (TD)., M.T.	Kepala Subbagian Tata Usaha	8-1-2025	g
4.	Disetujui	Andreas, S.E, M.E.	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan	8-1-2025	
5.	Disetujui	Herwanto, A.Md.LLAJ., S.IP., M.M.	Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	8-1-2025	
6.	Disetujui	Syaifullah, S.T.	Plt. Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	8-1-2025	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edy Purwanto

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ahmad Yani, A.T.D., M.T.

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Ahmad Yani, A.T.D., M.T.
NIP. 19650930 199003 1 003

Sorong, 15 Januari 2025
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Papua Barat

Edy Purwanto
NIP. 19841217 200912 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II PAPUA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1.	SK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7
2.	SK2 Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
3.	SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	500
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
4.	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5.	SK1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	60.113.993.000
2. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	17.352.602.000
3. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	3.914.645.000
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	10.862.106.000

Sorong, 15 Januari 2025

Disetujui

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Ahmad Yani, A.T.D., M.T.
NIP. 19650930 199003 1 003Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Papua BaratEdy Purwanto
NIP. 19841217 200912 1 002

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					4. Pemeliharaan Perengkapan Jalan	-	30	40	50	60	80	100	-	-	-	-	-	2.068.167.000	
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi darat	Orang	500	Penyelenggaraan pekan keselamatan Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	300.000.000	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
					Penyelenggaraan Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD)	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	107.143.000	
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000.000	
4.	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	7,5	15	22,5	30	37,5	45	52,5	60	67,5	75	82,5	90	3.914.645.000	1. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 2. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan 3. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 4. Sub Bagian Tata Usaha
5.	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	7,5	15	22,5	30	37,5	45	52,5	60	67,5	75	82,5	90	8.345.931.000	Sub Bagian Tata Usaha

Sorong, 15 Januari 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Papua Barat

Edy Purwanto

NIP. 19841217 200912 1 002





Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Papua Barat**

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Masnah, S.Pd.I.	Penata Layanan Operasional	16-6-2025	<i>Ma.</i>
2.	Diperiksa	Raditya Firmansyah Darmawan, S.S.T (TD)., M.T.	Kepala Subbagian Tata Usaha	17-6-2025	<i>⊙</i>
3.	Disetujui	Raditya Firmansyah Darmawan, S.S.T (TD)., M.T.	Kepala Subbagian Tata Usaha	17-6-2025	<i>⊙</i>
4.	Disetujui	Andreas, S.E, M.E.	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan	17-6-2025	<i>A</i>
5.	Disetujui	Herwanto, A.Md.LLAJ., S.IP., M.M.	Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	17-06-2025	<i>W</i>
6.	Disetujui	M. Wahyu Arya Putra, SE., MMTR	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	17-06-25	<i>W</i>



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edy Purwanto

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.

Sorong, Juni 2025
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Papua Barat

Edy Purwanto
NIP. 19841217 200912 1 002

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II PAPUA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1.	SK2 Meningkatkan konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK2.1 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan	Trayek	25
2.	SK5 Meningkatkan rasio konektivitas jaringan transportasi penyeberangan	IKK5 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	1
		IKK6 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Trayek	5
3.	SK8 Meningkatkan Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK8.1 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	2
		IKK8.2 Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Lokasi	7
4.	SK9 Meningkatkan Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK9.2 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang	Kegiatan	6
		IKK9.5 Pengawasan Evaluasi MRL dan Andalalin	Kegiatan	5
		IKK9.6 Pengawasan Evaluasi Perlengkapan Jalan	Kegiatan	4

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
		IKK9.7 Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	1
5.	SK10 Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK10.2 Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah	Kegiatan	6
6.	SK11 Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK11.1 Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis	Unit	3.593
7.	SK12 Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	IKK12.1 Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	400
		IKK12.2 Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	100
8.	SK4 Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal	IKK4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3
		IKK4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1
		IKK4.3 Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan	Kegiatan	2
		IKK4.4 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1
		IKK4.5 Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
		IKK4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	6
		IKK4.7 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3
		IKK4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	1
		IKK4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	3
		IKK4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	3

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	60.113.993.000
2. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	17.352.602.000
3. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	3.914.645.000
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	10.862.106.000

Sorong, Juni 2025

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Papua Barat

Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.


Edy Purwanto
NIP. 19841217 200912 1 002



**REVISI I RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	SK2 Meningkatkan ya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK2.1 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan	Trayek	25	Subsidi Operasional Perintis Angkutan Jalan Provinsi Papua Barat	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	7.742.992.000	1. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 2. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
2.	SK5 Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK5 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	1	Pembangunan Pelabuhan Kaimana Tahap IV di Kab. Kaimana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	17.000.000.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
		IKK6 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Trayek	5	Layanan Subsidi Perintis di Provinsi Papua Barat	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	35.371.001.000	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
3.	SK8 Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK8.1 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	2	1. Rehabilitasi, Perbaikan dan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Klademak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	228.732.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
					2. Rehabilitasi, Perbaikan dan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Arar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	143.992.000	

NO	SABARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANOGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		IKK8.2 Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Lokasi	7	Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan : 1. Klademak; 2. Arar 3. Marampa 4. Polley 5. Batanta 6. Salawati 7. wasior	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	2.516.175.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
4.	SK9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK9.2 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang	Kegiatan	6	1. Kegiatan Pengendalian dan operasional angkutan barang (odol) di Provinsi Papua Barat Daya 3. Ramp Check angkutan barang di Provinsi Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	396.800.000	1. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 2. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK9.5 Pengawasan Evaluasi MRL dan Andalalin	Kegiatan	5	Pengawasan Evaluasi MRL dan Andalalin di Provinsi Papua Barat Daya	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	222.500.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK9.6 Pengawasan Evaluasi Perlengkapan Jalan	Kegiatan	4	Supervisi perlengkapan Jalan	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	382.002.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK9.7 Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	1	Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	84.760.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
5.	SK10 Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK10.2 Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah	Kegiatan	6	1. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya; 2. Pemeliharaan Alat Kalibrasi dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Kendaraan	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-	400.000.000	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					Bermotor; 3. Perawatan dan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor Non Statis.														
6.	SK11 Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK11.1 Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis	Unit	3.593	1. Pengaliran dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Paku Jalan) 2. Pengaliran dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pagar Pengaman Jalan (Guadrail)	-	-	-	3.385	-	-	-	-	-	-	-	-	2.149.475.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
						-	-	-	-	-	-	208	-	-	-	-	-	1.027.026.063	
7	SK12 Meningkatkan kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	IKK12.1 Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda IKK12.2 Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	400	Pelaksanaan kegiatan Pekan Keselamatan Jalan di Provinsi Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	300.000.000	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
			Orang	100	Penyelenggaraan Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) di Provinsi Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	107.143.000	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
8.	SK4 Meningkatkan Layanan Manajemen SDM Internal	IKK4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat IKK4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat IKK4.3 Kegiatan terkait Mutu SPIP Kemeterian Perhubungan	Kegiatan	3	1. Penyusunan RKKL Pagu Kebutuhan; 2. Penyusunan RKKL Pagu Indikatif; 3. Penyusunan RKKL Pagu Alokasi.	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	Sub Bagian Tata Usaha
			Dokumen	1	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Sub Bagian Tata Usaha
			Kegiatan	2	1. Penyusunan SPIP 2. Penyusunan Dokumen MR	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	Sub Bagian Tata Usaha

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		IKK4.4 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1	Kegiatan terkait dengan subbag keuangan/TU	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	Sub Bagian Tata Usaha
		IKK4.5 Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1	Tindak lanjut hasil Audit/Pemeriksaan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bagian Tata Usaha
		IKK4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	6	1. Kegiatan terkait pengelolaan BMN/Aset; 2. Kegiatan Penatausahaan BMN	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	Sub Bagian Tata Usaha
		IKK4.7 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	1. Kegiatan HUMAS 2. Kegiatan PPID	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	Sub Bagian Tata Usaha
		IKK4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	1	Kegiatan layanan perkantoran	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3.016.642.000	Sub Bagian Tata Usaha
		IKK4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	3	1. Kegiatan terkait pengadaan barang dan jasa non teknis 2. Kegiatan terkait pengadaan Pakaian Dinas 3. Kegiatan terkait pengadaan Peralatan Kehumasan (Podcast)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	272.720.000	Sub Bagian Tata Usaha
		IKK4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	3	1. Kegiatan Terkait Peningkatan Kompetensi SDM 2. Kegiatan Terkait Peningkatan Motivasi SDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	675.000.000	Sub Bagian Tata Usaha



Sorong, 17 Juni 2025
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Papua Barat

Edy Purwanto
NIP. 19841217 200912 1 002

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT**

BULAN JANUARI TAHUN 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-1				Realisasi Bulan-1		% Capaian Bulan-1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1.	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Perintis Angkutan Jalan Provinsi Papua Barat	Jumlah lintas angkutan jalan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	100	7.742.992.000	100	-	0	0,00	0,00	kegiatan sudah berjalan dengan menggunakan kontrak PL (Penunjukan Langsung) namun belum ada realisasi anggaran	rencana pembayaran termin I akan dilakukan pada minggu kedua bulan Februari setelah efisiensi anggaran di pusat telah selesai	1. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	1 Subsidi Operasional Perintis Angkutan Penyeberangan Provinsi Papua Barat	Jumlah Lintas Perintis Angkutan Penyeberangan Provinsi Papua Barat	Layanan Perintis Angkutan Penyeberangan Provinsi Papua Barat	100	100	35.371.001.000	100	0	0	0,00	0,00	kegiatan sudah berjalan dengan menggunakan kontrak PL (Penunjukan Langsung) namun belum ada realisasi anggaran	rencana pembayaran termin I akan dilakukan pada minggu kedua bulan Februari setelah efisiensi anggaran di pusat telah selesai	1. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 2. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7	1. Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan yang dikelola	Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dikelola	7	100	2.516.175.000	100	0	0	0,00	0,00	operasional pelabuhan penyeberangan masih dan sedang berjalan dengan baik	meningkatkan kualitas pelayanan di pelabuhan penyeberangan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
2.	SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	1. Monitoring dan pengawasan pemenuhan SPM Kapal	jumlah pengawasan pemenuhan SPM Kapal	Pemantauan dan evaluasi tupoksi Ditjen Hubdat	100	100	2.516.175.000	100	0,00	0	0,00	0,00	kegiatan SPM pelabuhan SDP Rencananya akan dilaksanakan pada triwulan II	Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
3.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	1. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipasang	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	1	100	921.292.000	100	0	-	0,00	0,00	kegiatan masih dalam proses persiapan kontrak	masih menunggu kepastian hasil efisiensi anggaran dari pusat	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
						2. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipelihara	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1	100	2.068.167.000	100	0	0	0,00	0,00	kegiatan masih dalam proses persiapan kontrak	masih menunggu kepastian hasil efisiensi anggaran dari pusat	

		IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	3. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipasang	Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	1	100	1.100.000.000	100	0	0	0,00	0,00	kegiatan masih dalam proses persiapan kontrak	masih menunggu kepastian hasil efisiensi anggaran dari pusat		
						4. Pengadaan dan Pemasangan Pelengkapan Jalan Prioritas Nasional	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipasang	Pengadaan dan Pemasangan Pelengkapan Jalan	4	100	12.456.000.000	100	0	0	0,00	0,00	telah dilakukan kontrak pada muka akan dilakukan paku jalan	rencana pembayaran uang dilakukan pada bulan Februari	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan	
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	500	1. Sosialisasi Keselamatan Berlatu Lintas	Jumlah Kumulatif Masyarakat yang Mendapat Sosialisasi pada PNKJ	Masyarakat yang Mendapat Sosialisasi pada PNKJ	500	100	407.143.000	100	0	0	0,00	0,00	rencana kegiatan akan dilaksanakan pada bulan September	melakukan persiapan seperti memesan perlengkapan untuk sosialisasi dll	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan	
		IKK7.a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	1. Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor	Jumlah UPUBKB Pemda dan Swasta yang dilakukan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor	kegiatan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor	1	100	400.000.000	100	0	0	0,00	0,00	rencana kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Maret 2025	menunggu surat permintaan kalibrasi dari Kota dan Kabupaten di Papua Barat Daya dan Papua Barat	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan	
4.	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1. Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	90	100	3.914.645.000	100	5,00	115.824.000	5,56	2,96	beberapa kegiatan rutin telah dilaksanakan seperti perjalanan dinas dan belanja keperluan kantor	melaksanakan kegiatan rutin dengan baik dan memperhatikan anggaran mengingat terdapat efisiensi anggaran.	1. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 2. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 3. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan 4. Subbagian Tata Usaha
5.	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	1. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	90	100	8.345.931.000	100	6,00	550.680.000	6,67	6,60	telah dilakukan belanja sewa untuk mes eselon 3 dab 4 serta sewa mes untuk pegawai	sisa belanja sewa akan dilaksanakan pada bulan Februari	Subbagian Tata Usaha

Sorong, 4 Februari 2025
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Papua Barat



Edy Purwanto
NIP. 19841217 200912 1 002

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT**

BULAN FEBRUARI TAHUN 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-2				Realisasi Bulan-2		% Capaian Bulan-2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1.	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Perintis Angkutan Jalan Provinsi Papua Barat	Jumlah Lintas angkutan jalan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	100	7.195.322.104	100	-	411.198.563	0,00	5,71	kegiatan sudah berjalan dan sudah pembayaran Termin I	rencana selanjutnya akan di lakukan addendum kontrak untuk menyesuaikan hasil efisiensi anggaran	1. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 2. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	1 Subsidi Operasional Perintis Angkutan Penyeberangan Provinsi Papua Barat	Jumlah Lintas Perintis Angkutan Penyeberangan Provinsi Papua Barat	Layanan Perintis Angkutan Penyeberangan Provinsi Papua Barat	100	100	16.609.782.000	100	0	1.236.500.104	0,00	7,44	kegiatan sudah berjalan dan sudah pembayaran Termin I	rencana selanjutnya akan di lakukan addendum kontrak untuk menyesuaikan hasil efisiensi anggaran	1. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 2. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7	1. Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan yang dikelola	Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dikelola	7	100	2.516.175.000	100	100	361.644.000	100,00	14,37	operasional pelabuhan penyeberangan masih dan sedang berjalan dengan baik	meningkatkan kualitas pelayanan di pelabuhan penyeberangan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik khususnya pada periode angkutan lebaran Tahun 2025	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
2.	SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	1. Monitoring dan pengawasan pemenuhan SPM Kapal	Jumlah pengawasan pemenuhan SPM Kapal	Pemantauan dan evaluasi tupoksi Ditjen Hubdat	100	100	2.516.175.000	100	10,00	361.644.000	10,00	14,37	kegiatan SPM pelabuhan SDP Rencananya akan dilaksanakan pada triwulan II	Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
3.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	1. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipasang	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	1	100	921.292.000	100	0	-	0,00	0,00	kegiatan masih dalam proses persiapan kontrak	masih menunggu kepastian hasil efisiensi anggaran dari pusat	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
						2. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipelihara	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1	100	2.068.167.000	100	0	0	0,00	0,00	kegiatan masih dalam proses persiapan kontrak	masih menunggu kepastian hasil efisiensi anggaran dari pusat	

		IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	3. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipasang	Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	1	100	1.100.000.000	100	0	0	0,00	0,00	kegiatan masih dalam proses persiapan kontrak	masih menunggu kepastian hasil efisiensi anggaran dari pusat	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
						4. Pengadaan dan Pemasangan Pelengkapan Jalan Prioritas Nasional	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipasang	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	4	100	12.456.000.000	100	0	0	0,00	0,00	telah dilakukan kontrak pada pengadaan paku jalan	rencana pembayaran uang muka akan dilakukan pada bulan Maret 2025	
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	500	1. Sosialisasi Keselamatan Berjalan Lintas	Jumlah Kumulatif Masyarakat yang Mendapat Sosialisasi pada PNKJ	Masyarakat yang Mendapat Sosialisasi pada PNKJ	500	100	407.143.000	100	0	0	0,00	0,00	rencana kegiatan akan dilaksanakan pada bulan September	melakukan persiapan seperti memesan perlengkapan untuk sosialisasi dll	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK7.a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	1. Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor	Jumlah UPUBKB Pemda dan Swasta yang dilakukan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor	kegiatan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor	1	100	400.000.000	100	0	0	0,00	0,00	rencana kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Maret 2025	menunggu surat permintaan kalibrasi dari Kota dan Kabupaten di Papua Barat Daya dan Papua Barat	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
4.	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1. Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	90	100	3.914.645.000	100	10,00	360.681.000	11,11	9,21	beberapa kegiatan rutin telah dilaksanakan seperti perjalanan dinas dan belanja keperluan kantor	melaksanakan kegiatan rutin dengan baik dan memperhatikan anggaran mengingat terdapat efisiensi anggaran.	1. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 2. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 3. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan 4. Subbagian Tata Usaha
5.	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	1. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	90	100	8.345.931.000	100	10,00	930.554.672	11,11	11,15	telah dilakukan belanja sewa untuk mes eselon 3 dab 4 serta sewa mes untuk pegawai	melaksanakan kegiatan rutin dengan baik dan memperhatikan anggaran mengingat terdapat efisiensi anggaran.	Subbagian Tata Usaha

Sorong, 4 Maret 2025
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Papua Barat



Edy Purwanto
NIP. 19841217 200912 1 002

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT**

BULAN MARET TAHUN 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-3				Realisasi Bulan-3		% Capaian Bulan-3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Perintis Angkutan Jalan Provinsi Papua Barat	Jumlah lintas angkutan jalan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	100	3.786.268.590	100	17,00	837.383.545	17,00	22,12	kegiatan sudah berjalan dan sudah pembayaran Termin II dan Telah dilakukan addendum kontrak untuk menyesuaikan hasil efisiensi anggaran	melaksanakan kegiatan dengan baik dan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia	1. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	1 Subsidi Operasional Perintis Angkutan Penyeberangan Provinsi Papua Barat	Jumlah Lintas Perintis Angkutan Penyeberangan Provinsi Papua Barat	Layanan Perintis Angkutan Penyeberangan Provinsi Papua Barat	100	100	12.346.883.000	100	17	1.236.500.104	17,00	10,01	kegiatan sudah berjalan dan sudah pembayaran Termin I dan telah di lakukan addendum kontrak untuk menyesuaikan hasil efisiensi anggaran	memproses pembayarn termin I untuk I lintasan yang belum ada realisasi anggaran dan melaksanakan kegiatan dengan baik dan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia	1. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 2. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7	1. Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan yang dikelola	Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dikelola	7	100	2.516.175.000	100	100	603.168.000	100,00	23,97	operasional pelabuhan penyeberangan masih dan sedang berjalan dengan baik	meningkatkan kualitas pelayanan di pelabuhan penyeberangan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik khususnya pada periode arus balik angkutan lebaran Tahun 2025	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
2.	SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	1. Monitoring dan pengawasan pemenuhan SPM Kapal	Jumlah pengawasan pemenuhan SPM Kapal	Pemantauan dan evaluasi tupoksi Ditjen Hubdat	100	100	2.516.175.000	100	20,00	603.168.000	20,00	23,97	kegiatan SPM pelabuhan SDP Rencananya akan dilaksanakan pada triwulan II	Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
3.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	1. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipasang	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	1	100	921.292.000	100	0	-	0,00	0,00	kegiatan masih dalam proses persiapan kontrak	masih menunggu kepastian hasil efisiensi anggaran dari pusat	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		2. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipelihara	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1	100	2.068.167.000	100	0	0	0,00	0,00	kegiatan masih dalam proses persiapan kontrak	masih menunggu kepastian hasil efisiensi anggaran dari pusat		

		IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	3. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipasang	Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	1	100	1.100.000.000	100	0	0	0,00	0,00	kegiatan masih dalam proses persiapan kontrak	masih menunggu kepastian hasil efisiensi anggaran dari pusat	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
						4. Pengadaan dan Pemasangan Pelengkapan Jalan Prioritas Nasional	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipasang	Pengadaan dan Pemasangan Pelengkapan Jalan	4	100	2.203.167.000	100	50	1.800.162.875	50,00	81,71	pekerjaan masih dan sedang berjalan saat ini sudah pembayaran uang muka	rencana pembayaran selanjutnya setelah progres pekerjaan sudah manngkat	
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	500	1. Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas	Jumlah Kumulatif Masyarakat yang Mendapat Sosialisasi pada PNKJ	Masyarakat yang Mendapat Sosialisasi pada PNKJ	500	100	407.143.000	100	0	0	0,00	0,00	rencana kegiatan akan dilaksanakan pada bulan September	melakukan persiapan seperti memesan perlengkapan untuk sosialisasi dll	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK7.a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	1. Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor	Jumlah UPUBKB Pemda dan Swasta yang dilakukan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor	kegiatan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor	1	100	400.000.000	100	0	0	0,00	0,00	rencana kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2025	menunggu surat permintaan kalibrasi dari Kota dan Kabupaten di Papua Barat Daya dan Papua Barat	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
4.	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1. Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	90	100	3.914.645.000	100	10,00	368.081.000	11,11	9,40	beberapa kegiatan rutin telah dilaksanakan seperti perjalanan dinas dan belanja keperluan kantor	melaksanakan kegiatan rutin dengan baik dan memperhatikan anggaran mengingat terdapat efisiensi anggaran.	1. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 2. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 3. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan 4. Subbagian Tata Usaha
5.	SK1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	1. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	90	100	8.345.931.000	100	20,00	2.033.087.035	22,22	24,36	telah dilakukan belanja sewa untuk mes eselon 3 dab 4 serta sewa mes untuk pegawai. Pembayaran gaji untuk PPNP dan jasa Outsorsing hingga bulan maret maret telah di bawarkan	melaksanakan kegiatan rutin dengan baik dan memperhatikan anggaran mengingat terdapat efisiensi anggaran.	Subbagian Tata Usaha

Sorong, 4 April 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Papua Barat



Edy Purwanto

NIP. 19841217 200912 1 002

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT**

BULAN APRIL TAHUN 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-4				Realisasi Bulan-4		% Capaian Bulan-4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Pesangguh Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antar moda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Perintis Angkutan Jalan Provinsi Papua Barat	Jumlah lintas angkutan jalan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	100	3.786.268.590	100	25,00	1.099.482.492	25,00	29,04	kegiatan sudah berjalan dan sudah pembayaran termin IV akan dilaksanakan pada awal bulan April. Telah dilakukan addendum kontrak untuk menyesuaikan hasil efisiensi	pembayaran termin IV akan dilaksanakan pada awal bulan April. melaksanakan kegiatan dengan baik dan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia	1. Seksi Serana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 2. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	1 Subsidi Operasional Perintis Angkutan Penyeberangan Provinsi Papua Barat	Jumlah Lintas Perintis Angkutan Penyeberangan Provinsi Papua Barat	Layanan Perintis Angkutan Penyeberangan Provinsi Papua Barat	100	100	12.346.883.000	100	17	2.276.000.521	17,00	18,43	kegiatan sudah berjalan dan sudah pembayaran termin I untuk lintasan yang belum ada realisasi anggaran dan melaksanakan kegiatan dengan baik dan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia	memproses pembayar termin I untuk lintasan yang belum ada realisasi anggaran dan melaksanakan kegiatan dengan baik dan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia	1. Seksi Serana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 2. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7	1. Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan yang dikelola	Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dikelola	7	100	2.516.175.000	100	100	721.821.960	100,00	28,69	operasional pelabuhan penyeberangan masih dan sedang berjalan dengan baik	meningkatkan kualitas pelayanan di pelabuhan penyeberangan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik khususnya pada periode arus balik angkutan lebaran Tahun 2025	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
2.	SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	1. Monitoring dan pengawasan pemenuhan SPM Kapal	Jumlah pengawasan pemenuhan SPM Kapal	Pembantuan dan evaluasi tupoksi Ditjen Hubdat	100	100	2.516.175.000	100	27,00	721.821.960	27,00	28,69	kegiatan SPM pelabuhan SDP Rencananya akan dilaksanakan pada triwulan II	Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan dan koordinasi dengan pihak terkait	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
3.	SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	1. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipasang	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	1	100	921.292.000	100	0		0,00	0,00	kegiatan masih dalam proses persiapan kontrak	masih menunggu kepastian hasil efisiensi anggaran dari pusat	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan, dan Pengawasan
					2. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipelihara	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1	100	2.068.167.000	100	15	397.520.300	15,00	19,23	kegiatan sudah pembayaran termin I	kegiatan masih dan sedang berjalan dengan baik	

		IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	3. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipasang	Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	1	100	1.100.000.000	100	0	0	0,00	0,00	kegiatan masih dalam proses persiapan kontrak	masih menunggu kepastian hasil efisiensi anggaran dari pusat		
						4. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipasang	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	4	100	2.203.167.000	100	100	2.695.693.250	100,00	95,12	kegiatan sudah dilaksanakan dan sudah dilakukan PHO	saat ini masih dalam tahap pemeliharaan hasil pekerjaan.	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan	
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang bersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	500	1. Sosialisasi Keselamatan Berjalan Lintas	Jumlah Kumulatif Masyarakat yang Mendapat Sosialisasi pada PNKJ	Masyarakat yang Mendapat Sosialisasi pada PNKJ	500	100	407.143.000	100	0	0	0,00	0,00	rencana kegiatan akan dilaksanakan pada bulan September	melakukan persiapan seperti memesan perlengkapan untuk sosialisasi dll	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan	
		IKK7.a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	1. Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor	Jumlah UPUKKB Pemda dan Swasta yang dilakukan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor	kegiatan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor	1	100	400.000.000	100	0	0	0,00	0,00	rencana kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2025	menunggu surat permintaan kalibrasi dari Kota dan Kabupaten di Papua Barat Daya dan Papua Barat	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan	
4.	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1. Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	90	100	3.914.645.000	100	10,00	540.121.500	11,11	13,80	beberapa kegiatan rutin telah dilaksanakan seperti perjalanan dinas dan belanja keperluan kantor	melaksanakan kegiatan rutin dengan baik dan memperhatikan anggaran mengingat terdapat efisiensi anggaran.	1. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 2. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 3. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan 4. Subbagian Tata Usaha
5.	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	1. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	90	100	8.345.931.000	100	25,00	2.369.559.515	27,78	26,39	telah dilakukan belanja sewa untuk mes eselon 3 dan 4 serta sewa mes untuk pegawai. Pembayaran gaji untuk PPNPN dan jasa Outsorsing hingga bulan maret maret telah	melaksanakan kegiatan rutin dengan baik dan memperhatikan anggaran mengingat terdapat efisiensi anggaran.	Subbagian Tata Usaha

Sorong, 2 Mei 2025
 Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
 Kelas II Papua Barat



Edy B. Swanto
 NIP. 19841217 200912 1 002

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT**

BULAN MEI TAHUN 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-5				Realisasi Bulan-5		% Capaian Bulan-5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1.	SK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Perintis Angkutan Jalan Provinsi Papua Barat	Jumlah lintas angkutan jalan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	100	6.436.860.143	100	64,00	1.543.634.241	64,00	23,98	kegiatan sudah berjalan dan sudah pembayaran Termin IV dan Telah dilakukan addendum kontrak untuk menyesuaikan hasil efisiensi anggaran	pembayaran termin V akan dilaksanakan pada awal bulan Juni. melaksanakan kegiatan dengan baik dan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia	1. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 2. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK1.5	Persentase pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	1 Subsidi Operasional Perintis Angkutan Penyeberangan Provinsi Papua Barat	Jumlah Lintas Perintis Angkutan Penyeberangan Provinsi Papua Barat	Layanan Perintis Angkutan Penyeberangan Provinsi Papua Barat	100	100	15.842.738.000	100	60	2.276.000.521	60,00	14,37	kegiatan sudah berjalan dan sudah pembayaran Termin II dan telah di lakukan addendum kontrak untuk menyesuaikan hasil efisiensi anggaran	memproses pembayarn termin I untuk I lintasan yang belum ada realisasi anggaran dan melaksanakan kegiatan dengan baik dan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia	1. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 2. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7	1. Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan yang dikelola	Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dikelola	7	100	2.516.175.000	100	100	873.630.741	100,00	34,72	operasional penyeberangan masih dan sedang berjalan dengan baik	meningkatkan kualitas pelayanan di pelabuhan penyeberangan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik khususnya pada masa persiapan lebaran Idul adha Tahun 2025	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
2.	SK2 Meningkatkan pelayanan transportasi darat	IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	1. Monitoring dan pengawasan pemenuhan SPM Kapal	jumlah pengawasan pemenuhan SPM Kapal	Pemantauan dan evaluasi tupoksi Ditjen Hubdat	100	100	2.516.175.000	100	27,00	873.630.741	27,00	34,72	kegiatan SPM pelabuhan SDP Rencananya akan dilaksanakan pada triwulan II	Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
3.	SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	1. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipasang	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	1	100	921.292.000	100	0	-	0,00	0,00	kegiatan masih dalam proses persiapan kontrak	masih menunggu kepastian hasil efisiensi anggaran dari pusat	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
						2. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipelihara	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1	100	1.325.401.000	100	100	1.093.455.825	100,00	82,50	kegiatan sudah pembayaran termin I	kegiatan masih dan sedang berjalan dengan baik	

		IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	3.	Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipasang	Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	1	100	1.100.000.000	100	0	0	0,00	0,00	kegiatan masih dalam proses persiapan kontrak	masih menunggu kepastian hasil efisiensi anggaran dari pusat		
						4.	Pengadaan dan Pemasangan Pelengkapan Jalan Prioritas Nasional	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipasang	Pengadaan dan Pemasangan Pelengkapan Jalan	4	100	3.230.193.063	100	100	2.511.274.819	100,00	77,74	kegiatan pengadaan dan pemasangan paku jalan sudah dilaksanakan dan sudah dilakukan pekerjaan PHO. Sedangkan pengadaan dan pemasangan guadrail sudah pembayaran uang muka	saat ini untuk pengadaan paku jalan masih dalam tahap pemeliharaan hasil pekerjaan sedangkan kegiatan pengadaan dan pemasangan guadrail masih dan sedang	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan	
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	500	1.	Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas	Jumlah Kumulatif Masyarakat yang Mendapat Sosialisasi pada PNKJ	Masyarakat yang Mendapat Sosialisasi pada PNKJ	500	100	407.143.000	100	0	0	0,00	0,00	rencana kegiatan akan dilaksanakan pada bulan September, namun masih menyesuaikan dengan hasil efisiensi anggaran	melakukan persiapan seperti memesan perlengkapan untuk sosialisasi dll	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan	
		IKK7.a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	1.	Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor	Jumlah UPUBKB Pemda dan Swasta yang dilakukan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor	kegiatan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor	1	100	400.000.000	100	0	0	0,00	0,00	rencana kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2025	menunggu surat permintaan kalibrasi dari Kota dan Kabupaten di Papua Barat Daya dan Papua Barat	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan	
4.	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1.	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	90	100	3.914.645.000	100	10,00	580.102.500	11,11	14,82	beberapa kegiatan rutin telah dilaksanakan seperti perjalanan dinas dan belanja keperluan kantor	melaksanakan kegiatan rutin dengan baik dan memperhatikan anggaran mengingat terdapat efisiensi anggaran.	1. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 2. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 3. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan 4. Subbagian Tata Usaha
5.	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	1.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	90	100	8.345.931.000	100	32,00	3.083.895.334	35,56	36,95	telah dilakukan belanja sewa untuk mes eselon 3 dan 4 serta sewa mes untuk pegawai. Pembayaran gaji untuk PPNPN dan jasa Outsorsing hingga bulan Mei telah di bayarkan	melaksanakan kegiatan rutin dengan baik dan memperhatikan anggaran mengingat terdapat efisiensi anggaran.	Subbagian Tata Usaha

Sorong, 2 Juni 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Papua Barat



Edy Purwanto
NIP. 19841217 200912 1 002

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT**

BULAN JUNI TAHUN 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-6				Realisasi Bulan-6		% Capaian Bulan-6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	SK2 Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK2,2 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan	Trayek	25	Subsidi Operasional Perintis Angkutan Jalan Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya	Jumlah lintas angkutan jalan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Jalan Perintis	25	100	6.436.860.143	100	64,00	2.109.208.997	64,00	32,77	kegiatan sudah berjalan dan sudah pembayaran Termin IV dan Telah dilakukan addendum kontrak untuk menyesuaikan hasil efisiensi anggaran	pembayaran termin V akan dilaksanakan pada awal bulan Juli. melaksanakan kegiatan dengan baik dan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia	1. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 2. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
2.	SK5 Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK5 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	1	Pembangunan Pelabuhan Kaimana Tahap IV di Kab. Kaimana	Pembangunan Pelabuhan Kaimana Tahap IV di Kab. Kaimana	Pembangunan Pelabuhan Kaimana Tahap IV di Kab. Kaimana	1	100	17.000.000.000	100	0	0	0,00	0,00	kegiatan belum dapat dilaksanakan karena sampai saat ini Pagu Anggaran masih di Blokir	melakukan koordinasi kebagian anggaran terkait kemungkinan pembukaan blokir anggaran	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
		IKK6 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Trayek	5	Layanan Subsidi Perintis di Provinsi Papua Barat	Layanan Subsidi Perintis di Provinsi Papua Barat	Layanan Subsidi Perintis di Provinsi Papua Barat	5	100	15.712.625.000	100	60	10.287.160.906	60,00	65,47	kegiatan sudah berjalan dan sudah pembayaran Termin V dan telah dilakukan Addendum kontrak untuk menyesuaikan dengan efisiensi anggaran	selanjutnya pembayaran termin VI akan dilakukan pada pertengahan bulan Juli 2025	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
3.	SK8 Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK8.1 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	2	1. Rehabilitasi, Perbaikan dan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Klademak	Rehabilitasi, Perbaikan dan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Klademak	Rehabilitasi, Perbaikan dan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Klademak	1	100	228.732.000	100	0,00	0	0,00	0,00	saat ini kegiatan masih dalam tahap persiapan rencana kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan IV	melakukan persiapan kegiatan seperti inventaris gedung terminal bagian mana saja yang akan dilakukan rehabilitasi	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
					2. Rehabilitasi, Perbaikan dan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Arar	Rehabilitasi, Perbaikan dan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Arar	Rehabilitasi, Perbaikan dan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Arar	1	100	143.992.000	100	0	-	0,00	0,00			
		IKK8.2 Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Lokasi	7	Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan : 1. Klademak; 2. Arar 3. Marampa 4. Folley 5. Batanta 6. Salawati 7. wasior	Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan : 1. Klademak; 2. Arar 3. Marampa 4. Folley 5. Batanta 6. Salawati 7. wasior	Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan : 1. Klademak; 2. Arar 3. Marampa 4. Folley 5. Batanta 6. Salawati 7. wasior	7	100	2.516.175.000	100	100	938.654.069	100,00	37,30	operasional pelabuhan penyeberangan masih dan sedang berjalan dengan baik	meningkatkan kualitas pelayanan di pelabuhan penyeberangan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik khususnya pada masa persiapan lebaran idul adha Tahun 2025	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

4.	SK9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK9.2	Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang	Kegiatan	6	1.	Kegiatan Pengendalian dan operasional angkutan barang (odol) di Provinsi Papua Barat Daya	Kegiatan Pengendalian dan operasional angkutan barang (odol) di Provinsi Papua Barat Daya	Kegiatan Pengendalian dan operasional angkutan barang (odol) di Provinsi Papua Barat Daya	3	100	396.800.000	100	60	149.426.000	60	37,66	telah di lakukan Rampcheck pada angkutan orang maupun angkutan penyeberangan pada periode angkutan lebaran dan saat ini dilakukan sosialisasi ODOL baik melalui media Online maupun media cetak	rencanan selanjutnya akan dilakukan penindakan pada kendaraan odol di provinsi papua Barat Daya pada Bulan Agustus 2025	1. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	
							2.	Ramp Check angkutan barang di Provinsi Papua Barat Daya	Ramp Check angkutan barang di Provinsi Papua Barat Daya	Ramp Check angkutan barang di Provinsi Papua Barat Daya	3	100	396.800.000	100	60	149.426.000	60,00	37,66		2. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan		
			IKK9.5	Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin	Kegiatan	5	Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin di Provinsi Papua Barat Daya	Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin di Provinsi Papua Barat Daya	Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin di Provinsi Papua Barat Daya	5	100	394.620.000	100	50	37.993.000	50,00	9,63	kegiatan masih dan sedang dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat kendala	selalu melkukan koordinasi dan pemantauan secara langsung agar dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan		
			IKK9.6	Pengawasan Evaluasi Perengkapan Jalan	Kegiatan	4	Supervisi perlengkapan Jalan	Supervisi perlengkapan Jalan	Supervisi perlengkapan Jalan	4	100	382.002.000	100	20	53.692.000	20,00	14,06	saat ini pengadaan dan pemasangan paskes telah selesai dilaksanakan	melakukan pengawasan terhadap Faskes yang telah terpasang	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan		
			IKK9.7	Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Kegiatan	1	Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perengkapan Jalan	1	100	84.760.000	100	0,00	0	0,00	0,00	saat ini pemeliharaan paskes masih dan sedang berlangsung	melakukan pengawasan dengan baik	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan		
5.	SK10	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK10.2	Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah	Kegiatan	6	1.	Kegiatan kalibrasi alat uji berkala di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya	Kegiatan kalibrasi alat uji berkala di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya	Kegiatan kalibrasi alat uji berkala di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya	6	100	400.000.000	100	0,00	0	0,00	0,00	rencana kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2025 namun menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran mengingat saat ini terdapat efisiensi anggaran di setiap unit kerja	menunggu surat permintaan kalibrasi dari Kota dan Kabupaten di Papua Barat Daya dan Papua Barat	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	
							2.	Pemeliharaan Alat Kalibrasi dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor.	Pemeliharaan Alat Kalibrasi dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor.	Pemeliharaan Alat Kalibrasi dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Kendaraan												
							3.	Perawatan dan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor Non Statis.	Perawatan dan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor Non Statis.	Perawatan dan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor Non Statis.												
6.	SK11	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK11.1	Jumlah Perengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis	Unit	3593	1.	Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan (Paku Jalan)	Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan (Paku Jalan)	Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan (Paku Jalan)	3385	100	2.149.475.000	100	100,00	2.149.475.000	100,00	100,00	kegiatan pengadaan dan pemasangan paku jalan sudah dilaksanakan dan sudah dilakukan PHO. Sedangkan pengadaan dan pemasangan guardrail sudah pembayaran uang muka	saat ini untuk pengadaan paku jalan masih dalam tahap pemeliharaan hasil pekerjaan sedangkan kegiatan pengadaan dan pemasangan guardrail sudah berjalan.	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan	
							2.	Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan pagar Pengaman Jalan (Guadrail)	Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan pagar Pengaman Jalan (Guadrail)	Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan pagar Pengaman Jalan (Guadrail)	208	100	1.027.026.063	100	30,00	308.107.819	30,00	30,00				

7.	SK12	Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	IKK12.1	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	400	Pelaksanaan kegiatan Pekan Keselamatan Jalan di Provinsi Papua Barat Daya	Pelaksanaan kegiatan Pekan Keselamatan Jalan di Provinsi Papua Barat Daya	Pelaksanaan kegiatan Pekan Keselamatan Jalan di Provinsi Papua Barat Daya	400	100	300.000.000	100	0,00	0	0,00	0,00	rencana kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2025 namun menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran mengingat saat ini terdapat efisiensi anggaran di setiap unit kerja	melakukan koordinasi kebagian anggaran terkait kemungkinan pembukaan blokir anggaran	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
			IKK12.2	Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	100	Penyelenggaraan Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) di Provinsi Papua Barat Daya	Penyelenggaraan Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) di Provinsi Papua Barat Daya	Penyelenggaraan Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) di Provinsi Papua Barat Daya	100	100	107.143.000	100	0,00	0	0,00	0,00	rencana kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2025 namun menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran mengingat saat ini terdapat efisiensi anggaran di setiap unit kerja	melakukan koordinasi kebagian anggaran terkait kemungkinan pembukaan blokir anggaran	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
8.	SK4	Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal	IKK4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	1. Penyusunan RKKL Pagu Kebutuhan; 2. Penyusunan RKKL Pagu Indikatif; 3. Penyusunan RKKL Pagu Alokasi.	1. Penyusunan RKKL Pagu Kebutuhan; 2. Penyusunan RKKL Pagu Indikatif; 3. Penyusunan RKKL Pagu Alokasi.	1. Penyusunan RKKL Pagu Kebutuhan; 2. Penyusunan RKKL Pagu Indikatif; 3. Penyusunan RKKL Pagu Alokasi.	3	100	1.885.240.000	100		449.584.500	0,00	23,85	saat ini kegiatan penyusunan pagu kebutuhan TA. 2026 masih dan sedang berjalan	melakukan koordinasi yang baik dengan pihak internal BPTD Kelas II Papua Barat maupun pemerintah pusat	Sub Bagian Tata Usaha
			IKK4.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	1	100	1.885.240.000	100		449.584.500	0,00	23,85	saat ini sedang dilaksanakan persiapan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal	melakukan pemenuhan data dukung sesuai kentuan evaluator	Sub Bagian Tata Usaha
			IKK4.3	Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan	Kegiatan	2	1. Penyusunan SPIP 2. Penyusunan Dokumen MR	1. Penyusunan SPIP 2. Penyusunan Dokumen MR	1. Penyusunan SPIP 2. Penyusunan Dokumen MR	2	100	1.885.240.000	100		449.584.500	0,00	23,85	saat ini sedang dilakukan pemeriksaan lembar kerja evaluasi oleh Inspektorat Jenderal	melakukan pemenuhan data dukung sesuai kentuan evaluator	Sub Bagian Tata Usaha
			IKK4.4	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1	Kegiatan terkait dengan subbag keuangan/TU	Kegiatan terkait dengan subbag keuangan/TU	Kegiatan terkait dengan subbag keuangan/TU	1	100	1.885.240.000	100		449.584.500	0,00	23,85	saat ini tingkat penyerapan anggaran masih renda karena terdapat anggaran yang di blokir sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan	melakukan revisi anggaran dan percepatan penyerapan anggarman	Sub Bagian Tata Usaha
			IKK4.5	Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1	Tindak lanjut hasil Audit/Pemeriksaan	Tindak lanjut hasil Audit/Pemeriksaan	Tindak lanjut hasil Audit/Pemeriksaan	1	100	1.885.240.000	100		449.584.500	0,00	23,85	telah dibuat surat tindak lanjut atas temuan itjen	melakukan koordinasi dengan pihak penyedia yang pekerjaannya menjadi temuan itjen	Sub Bagian Tata Usaha

IKK4.6	Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	6	1. Kegiatan terkait pengelolaan BMN/Aset; 2. Kegiatan Penatausahaan BMN	1. Kegiatan terkait pengelolaan BMN/Aset; 2. Kegiatan Penatausahaan BMN	1. Kegiatan terkait pengelolaan BMN/Aset; 2. Kegiatan Penatausahaan BMN	6	100	1.885.240.000	100		449.584.500	0,00	23,85	saat ini masih terdapat beberapa aset BMN yang belum tercatat	melakukan penatausahaan Aset BMN yang belum tercatat dengan baik	Sub Bagian Tata Usaha
IKK4.7	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	1. Kegiatan HUMAS 2. Kegiatan PPID	1. Kegiatan HUMAS 2. Kegiatan PPID	1. Kegiatan HUMAS 2. Kegiatan PPID	3	100	1.885.240.000	100		449.584.500	0,00	23,85	saat ini selalu dilakukan sosialisasi terkait keselamatan baik melalui media online maupun media cetak	melakukan pemantauan terhadap respon masyarakat terkait postingan pada media sosial	Sub Bagian Tata Usaha
IKK4.8	Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	1	Kegiatan layanan perkantoran	Kegiatan layanan perkantoran	Kegiatan layanan perkantoran	1	100	3.016.642.000	100		815.494.374	0,00	27,03	saat ini kegiatan layanan perkantoran masih dan sedang berjalan dengan baik	melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan perkantoran namun tetap menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Sub Bagian Tata Usaha
IKK4.9	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	3	1. Kegiatan terkait pengadaan barang dan jasa non teknis 2. Kegiatan terkait pengadaan Pakaian Dinas 3. Kegiatan terkait pengadaan Peralatan Kehumasan (Podcast)	1. Kegiatan terkait pengadaan barang dan jasa non teknis 2. Kegiatan terkait pengadaan Pakaian Dinas 3. Kegiatan terkait pengadaan Peralatan	1. Kegiatan terkait pengadaan barang dan jasa non teknis 2. Kegiatan terkait pengadaan Pakaian Dinas 3. Kegiatan terkait pengadaan	3	100	272.720.000	100		0	0,00	0,00	telah dilakukan revisi anggaran untuk pemenuhan alat kehumasan namun saat ini anggarannya masi terblokir	melakukan koordinasi kebagian anggaran terkait kemungkinan pembukaan blokir anggaran	Sub Bagian Tata Usaha
IKK4.10	Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	3	1. Kegiatan Terkait Peningkatan Kompetensi SDM 2. Kegiatan Terkait Peningkatan Motivasi SDM	1. Kegiatan Terkait Peningkatan Kompetensi SDM 2. Kegiatan Terkait Peningkatan Motivasi SDM	1. Kegiatan Terkait Peningkatan Kompetensi SDM 2. Kegiatan Terkait Peningkatan Motivasi SDM	3	100	675.000.000	100		0	0,00	0,00	saat ini anggaran masih terblokir, untuk pelaksanaan kegiatan akan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran	melakukan koordinasi kebagian anggaran terkait kemungkinan pembukaan blokir anggaran	Sub Bagian Tata Usaha

Sorong, 3 Juli 2025
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Papua Barat

Edy Purwanto
NIP. 19841217 200912 1 002



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI**